

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
HUBUNGAN SEKSUAL DI LUAR PERNIKAHAN DALAM  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**

**Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Hukum Pidana Islam**



**Oleh:**

**MOH FADLLI KHOIRINA**

**122211045**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2019**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp./Fax. 7601291, 7624691 Semarang 50185

LEMBAR PERSETUJUAN

Lamp. : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Sdr. Moh Fadlli Khoirina

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, maka bersama ini saya  
kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Moh Fadlli Khoirina

NIM : 122211045

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hubungan Seksual di Luar  
Pernikahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera  
dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, Juli 2019  
Pembimbing I

Dr. H. Mashudi, M. Ag.  
NIP. 196671113 200501 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp./Fax. 7601291, 7624691 Semarang 50185

LEMBAR PERSETUJUAN

Lamp.: 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Sdr. Moh Fadlli Khoirina

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, maka bersama ini saya  
kirirkan naskah skripsi saudara :

Nama : Moh Fadlli Khoirina

NIM : 122211045

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hubungan Seksual di Luar  
Pernikahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera  
dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, Juli 2019  
Pembimbing II

Dr. H. Ja'far Baehaqi, S. Ag., M.H.  
NIP. 19730821 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp./Fax. 7601291, 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : MOH FADLLI KHOIRINA  
NIM : 122211045  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hubungan Seksual di  
Luar Pernikahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dinyatakan LULUS dengan predikat Cumlaude/ Baik/ Cukup, pada tanggal:

22 Juli 2019

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir dalam menyelesaikan studi program sarjana Strata I guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Semarang, 1 Agustus 2019

Mengetahui,

Ketua Sidang

Drs. Sahidin, M. Si.  
NIP. 196703211993031005

Sekretaris Sidang

Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.  
NIP. 197308212000031002

Penguji Utama I

Drs. H. Mohammad Solek M.Ag.  
NIP. 196603181993031004

Penguji Utama II

Muhammad Harun, S.Ag., M.H.  
NIP. 197508152008011017

Pembimbing I

Dr. H. Mashudi, M.Ag.  
NIP. 196671113 2005011001

Pembimbing II

Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.  
NIP. 197308212000031002

## MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (Al-Isra’ : 32)”

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOH FADLLI KHOIRINA  
NIM : 122211045  
Fakultsa : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Pidana Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

### TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUBUNGAN SEKSUAL DI LUAR PERNIKAHAN DALAM KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.



Semarang, Juli 2019  
Peneliti,

Moh Fadlli Khoirina  
NIM: 122211045

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya kepada hambanya ini, serta shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW dan para sahabat yang mulia semoga sebuah karya sederhana ini menjadi kebanggaan bagi keluargaku tercinta.

Saya persembahkan karya ini untuk:

1. Almamater saya tercinta Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
2. Kedua Orang Tua saya tercinta (Bapak Suparlan dan Ibu Siti Asiroh) yang selalu memberikan motivasi dan mencurahkan segala kasih sayang serta do'a yang tak henti-hentinya selalu diberikan untuk penulis
3. Kakak dan adik saya tercinta (Ilmi Alivia Aryani, M Taufiq Rosyadi dan Fannaani Ahmada) yang selalu memberikan dukungan serta do'a agar saya menjadi lebih baik.
4. Keluarga CK I (Wahyu, Salim, Farid, Samsul, Khoirul, Ansori, Jokowi, Nizar, Habib, Miftah, Gunawan, Rio, Rifan, Tauki, Dio, Fuad) yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk penulis
5. Keluarga Besar Ikamaru Walisongo yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk penulis

6. Keluarga Besar Walisongo Sport Club (WSC) yang telah memberikan wadah untuk penulis dalam berorganisasi dan menjadi lebih baik.
7. Keluarga Besar Futsal UIN, terkhusus Choach Qorby Haqul Adam, Coach Arif Kurnia Rahman, dan Coach Zahrul Anam yang selalu memotifasi dan memberikan arahan kepada penulis
8. Semua pihak yang senantiasa memberikan do'a, dukungan, serta motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan.

“TERIMAKASIH UNTUK SEMUANYA”



## ABSTRAK

Hukum pidana Islam adalah hukum terhadap peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan jiwa, harta, atau lainnya yang diancam dengan hukuman dan telah diatur oleh syari'at Islam. Salah satu yang dibahas dalam hukum pidana islam adalah *jarimah* zina, *jarimah* zina sendiri dibagi menjadi dua pertama zina *muhsan* (zina yang dilakukan oleh orang yang telah menikah) hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan dirajam hingga meninggal dunia, kedua zina *ghairu muhsan* (zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah) hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan di asingkan selama satu tahun. Hukuman-hukuman tersebut termasuk kedalam *jarimah* hudud dimana hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak boleh di gugurkan oleh siapapun.

Hubungan seksual di luar pernikahan dalam hukum islam di sebut sebagai *jarimah* zina dan bagi orang yang melakukannya akan mendapatkan hukuman, sedangkan dalam KUHP hanya hubungan seksual di luar pernikahan yang dilakukan oleh orang yang telah menikah dengan orang lainlah yang bisa disebut sebagai delik zina, selain itu hubungan seksual diluar nikah yang dapat dimasukkan dalam delik zina menurut KUHP adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan pingsan, diancam dengan kekerasan, belum berumur 15 tahun.

KUHP (kitabundang-undang hukum pidana) adalah peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan di Negara Indonesia adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial belanda, jadi sampai saat ini teks resmi KUHP yang digunakan di Indonesia hanya terjemahan belaka, bukan terjemahan resmi yang disahkan oleh suatu undang-undang.

Masyarakat indonesia yang mayoritas beragama Islam, belum bisa secara keseluruhan menjalankan apayang diperintahkan di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini dikarenakan banyaknya perbedaan dalam huku Islam dengan Hukum positif yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah permasalahan perzinaan. Oleh karena itu masyarakat indonesia tetap harus patuh terhadap KUHP dan juga tidak melupakan hukum Islam sebagai acuan dalam melakukan sesuatu. Karena hukum islam bertujuan untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan manusia yaitu agama, jiwa, harta, akal pikiran, keturunan, kebutuhan akan kebaikan hidup manusia.

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Delik Zina, KUHP

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul: **"TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP EKSISTENSI DELIK PERZINAAN DALAM HAL PRIA MENIKAHI WANITA YANG DIHAMILI DILUAR NIKAH (Kajian Terhadap Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam)."** Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag. dan Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H. yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan UIN Walisongo yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yan diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Seluruh Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak membantu dalam akademik.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, Juli 2019  
Penulis,



**Moh Fadli Khoirina**  
NIM: 122211045

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	x

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	13

## BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUBUNGAN SEKSUAL DI LUAR NIKAH (ZINA) DALAM HUKUM ISLAM DAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

A. Hubungan Seksual Di Luar Nikah (Zina) Dalam Hukum Islam .....	15
--	----

B. Hubungan Seksual di Luar Nikah (zina) dalam KUHP .....	43
<b>BAB III TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PROSPEK DELIK ZINA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA INDONESIA</b>	
A. Problem Penegakan Delik Zina di Indonesia.....	48
B. Prospek Delik Zina di Indonesia.....	56
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUBUNGAN SEKSUAL DI LUAR PERNIKAHAN DALAM KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA</b>	
A. Efektifitas Antara Hukum Pidana Islam Dengan KUHP Dalam Permasalahan Zina .....	71
B. Eksistensi Hukum Pidana Islam di Indonesia.....	78
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	94
B. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, di samping itu Indonesia juga menginginkan kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia, untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita tersebut, oleh karena itu hukum wajib dilaksanakan dan ditegakkan oleh semua warga Negara, hal ini telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara hukum”, Maka konsekuensi dari sebuah Negara hukum adalah semua bentuk keputusan tindakan alat-alat perlengkapan Negara, tingkahlaku dan perbuatan yang dilakukan oleh warga Negara, harus memiliki landasan hukum.

Sebagai bangsa Indonesia yang beragama Islam, selain patuh terhadap hukum Negara ia juga wajib patuh terhadap hukum Islam. Hukum Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Setiap perilaku yang merugikan manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu

dilarang oleh Allah SWT.<sup>1</sup> Dalam hukum Islam dijumpai istilah *jinayah*, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal.<sup>2</sup>

Adapun perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat manusia serta menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal adalah *jarimah*. Menurut istilah para fuqaha', yang dinamakan *jarimah* adalah segala larangan *syara'* (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir.<sup>3</sup>

Secara umum ada tiga unsur seseorang dianggap telah melakukan perbuatan *jarimah*, yaitu : unsur formal, unsur material, dan unsur moral. Unsur formal adalah adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai dengan ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut. Unsur material adalah adanya perbuatan pidana baik melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Unsur moral yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata memiliki nilai untuk dapat dipertanggungjawabkan dalam hal ini disebut *mukalaf*.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm. 60

<sup>2</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta : Logung Pustaka, 2004, hlm. 2

<sup>3</sup> Rokhmadi, *Hukum pidana Islam*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. x-xii

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 22.

Ditinjau dari sanksi yang telah ditetapkan oleh *syara'*, *jarimah* dapat dibedakan menjadi tiga. Pertama, *jarimah hudud* yaitu jarimah yang hukumannya telah ditetapkan baik bentuk maupun jumlahnya oleh *syara'*. Ia menjadi hak Tuhan, hakim tidak mempunyai kewenangan untuk mempertinggi atau memperendah hukuman bila pelaku telah terbukti melakukan *jarimah* tersebut. yang termasuk kedalam *jarimah hudud* adalah zina, menuduh zina, minum-minuman keras, mencuri, merampok, keluar dari Islam dan memberontak.<sup>5</sup>

Kedua, jarimah *qishash* yaitu jarimah yang hukumannya telah ditetapkan oleh *syara'*, namun ada perbedaan dengan jarimah hudud dalam hal pengampunan. Pada *jarimah qishash*, hukuman bisa berpindah kepada *al-diyat* (denda) atau bahkan bebas dari hukuman, apabila korban atau wali korban memaafkan pelaku. Perbuatan yang termasuk dalam *jarimah qishash* adalah pembunuhan dan pelukaan. Pembunuhan terbagi kepada tiga, yaitu : pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan kekeliruan.<sup>6</sup>

Ketiga, *jarimah ta'zir* yaitu jarimah yang hukumannya tidak ditetapkan baik bentuk maupun jumlahnya oleh *syara'*, melainkan kewenangannya diberikan kepada Negara untuk menetapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Dapat dipahami juga bahwa *jarimah ta'zir* terdiri atas perbuatan-

---

<sup>5</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 150.

<sup>6</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam...*, hlm. 151.



perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan kifarat. Dengan demikian, inti dari *jarimah ta'zir* adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan seperti halnya tidak mau membayar zkat, meninggalkan shalat fardu dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Salah satu *jarimah* yang dapat menurunkan harkat dan martabat orang-orang yang melakukannya adalah jarimah zina. Zina adalah hubungan kelamin antara pria dan wanita di luar nikah, dimana perbuatan tersebut dilarang oleh agama. Ia merupakan kejahatan yang tergolong besar dalam Islam, sehingga dalam syariat Islam zina termasuk kedalam *jarimah hudud*.<sup>8</sup>

Hukum pidana Islam membagi zina menjadi dua macam: pertama adalah *zina ghairu muhsan* yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah, hukuman terhadap zina tersebut adalah didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, kedua adalah *zina muhsan* yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah sedangkan hukuman untuk zina muhsan adalah di dera seratus kali dan di rajam.<sup>9</sup> Penjelasan tersebut berlandaskan

---

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslich, *hukum pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 249.

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, *hukum pidana Islam...*, hlm. 3.

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *hukum pidana Islam...*, hlm. 29-33

ayat Al-Qur'an surah An-Nuur ayat 2 dan hadits Nabi Muhammad saw. Sebagai berikut:

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.<sup>10</sup>

Adapun hadits yang menjelaskan mengenai hukuman tentang zina adalah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ قَبْنِ اصَّامِتٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِهَئْنٍ سَبِيلًا. الْبُكَرُ بِلُكْرٍ جُلْدُ مِائَةٍ وَتَفَى سَنَةٌ وَالنَّيْبُ بِالنَّيْبِ جُلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ ( رواه الجماعة الا البخارى والنسائى )

Artinya: Dari ubadah ibnu Ash-shamit ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda "ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Quran, 2009, hlm. 350

*keluar (hukuman) bagi mereka pezina. Jejaka dan gadis hukumannya seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam."* (diriwayatkan oleh jama'ah kecuali Bukhari dan Nasa'i).<sup>11</sup>

Negara Indonesia memiliki pandangan tersendiri terkait dengan delik perzinaan. Jika Islam memandang semua hubungan kelamin di luar nikah sebagai zina, lain halnya dengan hukum positif yaitu terdapat di dalam Pasal 284 KUHP tentang perzinaan, di mana dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa perzinaan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang sudah terikat perkawinan dengan orang lain, jika salah satu saja yang telah terikat perkawinan, maka yang belum terikat itu disebut sebagai peserta pezina, apabila keduanya belum menikah maka tidak ada pezina kepada mereka.<sup>12</sup>

Dari penjelasan diatas, yang dapat dijerat dengan Pasal 284 hanyalah orang yang telah menikah saja, sedangkan untuk yang belum menikah tidak bisa dijerat dengan Pasal ini, oleh karena itu banyak muda mudi melakukan seks bebas sesuka hati mereka tak terkecuali oleh beberapa umat Islam di indoneisa.

Hal tersebut pasti sangat disayangkan telah terjadi di Negara Indonesia yang religius dan memiliki mayoritas

---

<sup>11</sup> Imam An-nawawi, *Syarah Syahih Muslim*, Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2013, hlm. 361

<sup>12</sup> Ahmad Wardi Muslich, *hukum pidana Islam...*, hlm. 3

masyarakat yang beragama. Seperti yang dijelaskan di atas terkait dengan perzinahan dalam hukum pidana Islam, orang yang melakukan hubungan seksual di luar nikah walaupun pelaku belum pernah melaksanakan pernikahan itu termasuk kedalam tindak pidana zina.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul: **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUBUNGAN SEKSUAL DI LUAR NIKAH DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap delik zina dalam kitab undang-undang hukum pidana?
2. Bagaimanakah eksistensi hukum pidana Islam terhadap hubungan seksual di luar nikah dalam kitab undang-undang hukum pidana ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah
  - a. Mengetahui bagaimana penjelasan mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap delik zina dalam kitab undang-undang hukum pidana.
  - b. Menjelaskan deskripsi atau uraian tentang eksistensi hukum pidana Islam terhadap hubungan seksual di luar nikah dalam kitab undang-undang hukum pidana.
2. Manfaat penelitian dalam skripsi ini adalah

- a. Penelitian skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan perzinaan. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum.
- b. Penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk memperluas gambaran dalam penulisan skripsi dan dijadikan study perbandingan maupun penunjang dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

#### **D. Tinjauan pustaka**

Penelusuran-penelusuran terhadap beberapa literatur telah penyusun lakukan untuk memastikan kemurnian dari pokok pembahasan yang diangkat dalam skripsi ini. Penelusuran-penelusuran tersebut juga sekaligus untuk mengembangkan study kepada penulis tentang permasalahan-permasalahan yang terkait dengan tema yang diteliti oleh penulis, Diantara beberapa penelitian yang trkait yaitu:

1. Skripsi karya Agus Choirul Walid yang berjudul "Melacak Dasar-Dasar Penerapan Had Rajam Bagi Pelaku Zina Muhson". Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana ketentuan-ketentuan had rajam bagi pelaku perzinaan dalam hukum pidana Islam, dan bagaimana alasan-alasan serta dasar-

dasar penerapan dilakukannya hukum rajam tersebut.<sup>13</sup> Sedangkan penelitian yang saya tulis adalah menjelaskan tentang tinjauan hukum pidana islam terhadap hubungan seksual di luar pernikahan dalam kitab undang-undang hukum pidana.

2. Skripsi yang berjudul " Analisis tindak pidana perzinaan (study komparatif antara hukum Islam dan hukum nasional)" karya Agustiawan, dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana ketentuan-ketentuan hukum terhadap perzinaan yang ditinjau dari hukum pidana Islam dan hukum nasional, mulai dari pengertian perzinaan, peranan terhadap masyarakat, dan ketegasan hukumnya.<sup>14</sup> Dalam skripsi karya agustiawan diatas sama sekali tidak menyinggung tentang adanya prospek atau eksistensi hukum pidana Islam di Indonesia.
3. Skripsi karya Ihda Shofiyatun Nisa yang berjudul "Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Tentang Delik Perzinaan" dalam skripsi ini menjelaskan tentang perbandingan peraturan perzinaan dalam hukum pidana Islam

---

<sup>13</sup> Agus Choirul Walid, "Melacak Dasar-Dasar Penerapan Had Rajam Bagi Pelaku Zina Muhson" Skripsi, Semarang, UIN Walisongo, 2015, di akses di <http://eprints.walisongo.ac.id/3657/> pada 27 desember 2018 pukul 00.49.

<sup>14</sup> Agustiawan, " Analisis tindak pidana perzinaan (study komparatif antara hukum Islam dan hukum nasional)", Skripsi UIN Alaudin Makasar, 2016, di akses di <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1297/> pada 27 desember 2018 pukul 00.54.

dengan hukum positif di Indonesia.<sup>15</sup> Dalam skripsi karya Ihda tidak ada pembahasan mengenai tentang tinjauan hukum pidana islam terhadap hubungan seksual di luar pernikahan dalam kitab undang-undang hukum pidana.

4. Skripsi karya hamsani yang berjudul “analisis hukum pidana Islam terhadap pasal 483 rancangan konsep KUHP tahun 2012 tentang zina. Dalam skripsi karya hamsani tersebut membahas tentang bagaimana konsep rancangan undang-undang KUHP pasal 483 tahun 2012 jika diterapkan di indonesia dan menjelaskan tentang analisis hukum pidana islam terhadap konsep tersebut.<sup>16</sup> sehingga walaupun dalam penulisan skripsi ini sama-sama menyinggung tentang perzinahan akan tetapi skripsi saya lebih menyinggung tentang eksistensi delik perzinahan dalam hukum pidana islam ketika ada seseorang yang melaksanakan kawin hamil sesuai dengan pasal 53.

---

<sup>15</sup> Ihda Shofiyatun Nisa, “Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Tentang Delik Perzinahan”, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2017, di akses di [https://www.google.com/search?q=study+komparasi+hukum+pidana+islam+dengan+hukum+positif+terhadap+zina%27&rlz=1C1GCEA\\_enID846ID846&oq=study+komparasi+hukum+pidana+islam+dengan+hukum+positif+terhadap+zina%27&aqs=chrome..69i57.21704j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=study+komparasi+hukum+pidana+islam+dengan+hukum+positif+terhadap+zina%27&rlz=1C1GCEA_enID846ID846&oq=study+komparasi+hukum+pidana+islam+dengan+hukum+positif+terhadap+zina%27&aqs=chrome..69i57.21704j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8) Pada 29 Juli 2019 pukul 02.24 WIB

<sup>16</sup> Hamsani, “ Analisis hukum pidana Islam terhadap pasal 483 rancangan konsep KUHP tahun 2012 tentang zina”. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018, di akses di [http://digilib.uinsby.ac.id/23393/7/Hamsani\\_C03211014.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/23393/7/Hamsani_C03211014.pdf) Pada 27 desember 2018 pukul 00.59.

Dari beberapa penelitian di atas belum ada yang secara rinci menjelaskan lebih lanjut tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap hubungan seksual di luar nikah dalam kitab undang-undang hukum pidana, maka dari itulah penting kiranya penelitian ini dilakukan supaya bisa mengetahui apakah hubungan seksual di luar nikah yang ditinjau menggunakan hukum Islam.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian dalam karya ilmiah ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, selain itu penelitian yang digunakan adalah berseifat kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain yang dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian ini dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsi dari organisasi, pergerakan-pergerakan social atau hubungan kekerabatan.<sup>17</sup>

### **2. Sumber penelitian**

Sumber penelitian merupakan faktor yang paling menentukan dalam suatu penelitian, oleh Karena itu sumber

---

<sup>17</sup> Anselm straus dan Juliet corbin, *dasar-dasar penelitian kualitatif*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997, hlm.11



penelitian harus valid, agar mampu memberikan gambaran-gambaran dan makna yang mendalam dalam penelitian yang terkait dengan judul skripsi yaitu tinjauan hukum pidana Islam terhadap hubungan seksual di luar nikah dalam kitab undang-undang hukum pidana. Adapun sumber penelitian yang digunakan adalah:

- a. Sumber penelitian primer, yaitu berupa Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286. Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - b. Sumber penelitian sekunder, yaitu berupa sumber-sumber data atau bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian ini sebagai tambahan atau pelengkap.
3. Metode Pengumpulan bahan penelitian

Metode pengumpulan bahan penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Oleh karena itu penulis menggunakan metode pengumpulan bahan penelitian kualitatif kepustakaan, yakni menggunakan teknik dokumentasi atau study dokumenter, yaitu dengan cara mencari bahan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 202

#### 4. Metode Analisis bahan penelitian

Untuk keperluan analisis bahan penelitian, penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Yaitu prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki berdasarkan data-data yang akurat.<sup>19</sup> Dalam hal ini yang hendak dipaparkan dan diuraikan adalah tinjauan hukum pidana Islam terhadap hubungan seksual di luar nikah dalam kitab undang-undang hukum pidana.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mengantarkan pada pemahaman yang utuh dan fokus terhadap pembahasan, penulis membuat sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab I, adalah pendahuluan, dalam bab ini akan memaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan umum tentang hubungan seksual di luar nikah dalam hukum Islam dan dalam kitab undang-undang hukum pidana, dimana dalam bab ini pertama-tama menjelaskan tentang hubungan seksual di luar nikah dimana dalam hukum islam disebut sebagai perzinaan yaitu meliputi pengertian zina, unsur-unsur jarimah zina, hukuman dalam

---

<sup>19</sup> Hasan Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas, Cet II, 1995, hlm. 68

jarimah zina, pembuktian jarimah zina, pelaksanaan had zina. Kedua membahas hubungan seksual di luar nikah di dalam kitab undang-undang hukum pidana meliputi penjelasan Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287.

Bab III, merupakan penjelasan dari tinjauan hukum pidana islam terhadap prospek delik zina dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia. Dimana dalam bab ini pertama membahas tentang problem penegakan delik zina di Indonesia, kedua membahas tentang prospek delik zina di Indonesia.

Bab IV, Tinjauan hukum islam terhadap hubungan seksual di luar pernikahan dalam kitab undang-undang hukum pidana. Dalam bab ini pertama akan membahas tentang efektifitas antara hukum pidana Islam dengan KUHP dalam permasalahan zina, kedua membahas mengenai eksistensi hukum pidana Islam di Indonesia.

Bab V, Penutup, dimana dalam bab ini merupakan penarikan kesimpulan yang diperoleh untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang ada dalam rumusan masalah, serta saran-saran dari penulis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG HUBUNGAN SEKSUAL DI LUAR NIKAH (ZINA) DALAM HUKUM ISLAM DAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

#### **A. Hubungan Seksual Di Luar Nikah (Zina) Dalam Hukum Islam**

##### **1. Pengertian zina**

Zina secara harfiah berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Sedangkan pengertian zina secara istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dimana satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan yang sah secara syariat Islam, atas dasar suka sama suka dan tanpa adanya keraguan dari para pelaku zina.<sup>1</sup>

Islam menganggap zina bukan hanya sebagai dosa besar saja, melainkan juga sebagai tindakan yang dapat memunculkan perselisihan didalam keluarga, sehingga hubungan keluarga menjadi tidak harmonis lagi dan dapat mencemari nama baik keluarga.<sup>2</sup> bahkan perbuatan zina bisa menyebarkan berbagai macam penyakit baik jasmani maupun

---

<sup>1</sup> Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 8

<sup>2</sup> Nur Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016, hlm. 49

rohani dan juga dapat membuka peluang untuk terjadinya kejahatan lainnya, seperti halnya pembunuhan.

Para ulama' memiliki pandangan-pandangan tersendiri terhadap perzinaan, akan tetapi substansi yang dikemukakan para ulama' hampir sama. Berikut ini adalah penjelasan para ulama' terkait dengan perzinaan.

- a. Mazhab Malikiyah mendefinisikan bahwa zina adalah "persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan". Oleh karena itu, jika tidak terjadi hubungan seksual tetapi hanya sebatas percumbuan saja, maka belum bisa dikatakan sebagai zina, meski percumbuan tersebut diharamkan oleh agama Islam dan dilakukan orang yang akil baligh (*mukallaf*).
- b. Pendapat Hanafiyah, zina adalah "persetubuhan yang haram dalam kemaluan seorang perempuan yang masih hidup dan bukan terpaksa di dalam negeri adil yang dilakukan oleh orang-orang yang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya (budak) dan tidak syubhat dalam miliknya". Jadi melakukan persetubuhan dengan mayat tidak bisa disebut sebagai zina, walaupun perbuatan tersebut dilarang oleh agama.
- c. Pendapat Syafi'i, zina adalah memasukkan zakar (kemaluan laki-laki) ke dalam kemaluan wanita yang

diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.

- d. Pendapat Hambaliyah, zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik kepada kemaluan maupun dubur.<sup>3</sup>

Jika kita perhatikan dari beberapa definisi tersebut diatas, maka substansi yang terkandung didalamnya adalah sama, yaitu bahwa zina dalam hukum pidana Islam adalah hubungan kelamin antara seorang wanita dan seorang laki-laki yang tidak melalui sebuah pernikahan. Ada sedikit perbedaan yang dikemukakan oleh madzhab Hambaliyah yang menegaskan bahwa zina adalah perbuatan keji yang dilakukan terhadap kemaluan atau bukan kemaluan (pantat). Dari berbagai macam definisi tentang zina diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa zina adalah perbuatan bersetubuh (memasukkan penis kedalam vagina) diluar ikatan pernikahan yang sah antara orang yang berbeda jenis kelaminnya.

Dalam hukum pidana Islam perbuatan zina dimaksudkan kepada pelaku yang telah menikah ataupun belum menikah. Islam menganggap zina bukan hanya sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang perbuatan memalukan saja, melainkan juga akan dapat merusak martabat keluarga, dan bisa memunculkan persoalan-persoalan hidup yang ada di

---

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm.6-7

masyarakat. Perbuatan ini akan menimbulkan banyak dampak, mulai dari aspek keturunan, kehormatan, merusak kesehatan jasmani dan rohani, moralitas, dan banyak hal-hal negatif lainnya.<sup>4</sup>

## 2. Unsur-unsur *jarimah* zina

Dari definisi zina yang di kemukakan diatas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur *jarimah* zina ada dua, yaitu:

### a. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam farji (kemaluan). Ukurannya adalah kepala kemaluan telah masuk kedalam farji walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan wanita, selama penghalangnya tipis dan tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.<sup>5</sup>

Di samping itu, untuk menentukan persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian apabila persetubuhan yang terjadi adalah dalam hak miliknya sendiri karena ikatan perkawinan, maka persetubuhan itu tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhan tersebut sebenarnya dilarang akan tetapi tetap dilakukan.

---

<sup>4</sup> Abdur Rahman Doi, *Inilah Syariat Islam*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1990, hlm. 340

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 8

Contohnya menyetubuhi istri ketika haid, nifas, atau sedang berpuasa ramadhan.<sup>6</sup>

b. Adanya kesengajaan atau niat melawan hukum

Unsur yang kedua dari *jarimah* zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang haram baginya. Dengan demikian, apabila seorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak mengetahui bahwa yang dikerjakannya adalah haram maka ia tidak dikenai hukuman had. Contoh dalam kasus tersebut adalah ketika seseorang yang menikah dengan seseorang yang sebenarnya mempunyai suami tetapi pria tersebut tidak mengetahuinya. Apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakannya perkawinan maka suami tidak dikenai pertanggungjawaban selama ia benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu masih dalam ikatan perkawinan dengan suami terdahulu.<sup>7</sup>

Unsur melawan hukum atau kesengajaan berbuat ini harus berbarengan dengan melakukan perbuatan yang diharamkan itu, bukan sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum tersebut harus ada pada saat dilakukannya

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 25



perbuatan yang dilarang. Contoh dalam kasus tersebut yaitu seseorang yang bermaksud melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya, tetapi kemudian terdapat kekeliruan dan yang disetubuhinya adalah istrinya sendiri maka perbuatannya itu tidak dianggap sebagai zina, karena persetubuhan yang dilakukan adalah persetubuhan yang tidak dilarang.<sup>8</sup>

### 3. Hukuman dalam *jarimah* zina

Zina merupakan perbuatan abmoral, mungkar dan berakibat sangat buruk bagi pelaku dan masyarakat. Hal itu merupakan salah satu perbuatan dosa besar dalam semua agama. Larangan-larangan terhadap perbuatan tersebut sudah sangat jelas diterangkan dalam Al-Qur'an, salah satunya adalah Surat al-isra':32

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.<sup>9</sup>

Dari ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa perbuatan yang mendekati zina saja dilarang dan tidak diperbolehkan oleh agama, apalagi sampai melakukan perbuatan tersebut. Selain ayat di atas, masih banyak lagi

---

<sup>8</sup> *ibid*

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*..., hlm. 285

ayat-ayat al-qur'an yang membahas mengenai zina, yaitu surat An-Nisa' ayat 15-16 sebagai berikut:

وَالَّتِي يَأْتِيَنِ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً  
مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ  
تَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾ وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِنْ  
تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya: Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya (Ayat: 15), Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang (Ayat: 16).<sup>10</sup>

Dari ayat tersebut di atas dapat di pahami bahwa ada tata cara sendiri untuk benar-benar menganggap orang telah melakukan zina, jika tata cakra tersebut telah terpenuhi dan dinyatakan adanya perbuatan zina, maka hukuman untuk pelaku zina adalah dipenjarakan didalam rumah dan disakiti

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 80

baik dengan pukulan pada badannya maupun dengan dipermalukan.

Ayat yang menyebutkan tentang zina selain yang sudah di jelaskan di atas yaitu: QS. al-Furqan: 68-69,

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ<sup>c</sup> وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾

Artinya: Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya (ayat: 68), yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina (ayat: 69)<sup>11</sup>

Ayat-ayat Al-qur'an tentang zina yang diwahyukan kepada nabi Muhammad secara bertahap, bertujuan untuk dapat diterima dengan mudah oleh orang-orang yang baru memeluk agama Islam yang sebelumnya terbiasa dengan melakukan perbuatan zina.<sup>12</sup>

Wahyu yang pertama mengenai zina, semata-mata membicarakan hukuman yang ditetapkan hanya terhadap

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*..., 366

<sup>12</sup> Abdur Rahman Doi, *Inilah Syari'at Islam*... hlm. 342

wanita berdosa karena pelanggaran seks di rumahnya, sampai mereka mati. Hal ini bisa dicermati dari QS. An-Nisa':15 tersebut di atas. Kemudian ayat berikutnya mencakup baik lelaki maupun perempuan dan sedikit yang menyebutkan secara khusus tentang hukuman zina.<sup>13</sup> Zina adalah suatu *fahisyah* (kejahatan) besar yang mewajibkan pelakunya di hukum siksa. Allah telah menggambarkan zina itu sebagai perbuatan keji yang sangat buruk dan seburuk-buruknya jalan. QS. al-Isra' ayat 32, Allah menunjukkan larangan untuk mendekati zina, apalagi sampai melakukannya. Dan Allah juga menyebutkan bahwa zina sama dengan syirik kepada Allah dan pembunuhan manusia tanpa hak serta mengancamnya dengan siksaan keras di hari kiamat seperti yang di jelaskan di dalam QS. al-Furqan: 68-69.<sup>14</sup>

Pada permulaan Islam, hukuman untuk tindak pidana zina adalah dipenjarakan di dalam rumah dan disakiti, baik dengan pukulan pada badannya maupun dengan dipermalukan hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 15-16 yang dijelaskan diatas.<sup>15</sup> Setelah Islam semakin berkembang maka ada perubahan dalam hukum zina yang ditandai dengan turunnya surah An-Nuur ayat 2 yang berbunyi:

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 343

<sup>14</sup> Imam al- Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar, 2002, hlm. 154

<sup>15</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 6

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ  
فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ  
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.<sup>16</sup>

Ayat itu diperjelas oleh rasulullah dengan sunah *qauliyah*nya sebagai berikut:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا. الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْسٌ سَنَةٌ وَالثَّيْبُ بِالْثَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّحْمُ (رواه الجماعة الا البخارى والنسائى).

Artinya: Dari Ubadah ibn Ash-shamit ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya allah telah memberikan jalan keluar (hukuman) bagi mereka (pezina). Jejaka dan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan *rajam*.” (diriwayatkan oleh jama’ah kecuali bukhari dan nasa’i).<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*..., hlm. 350

<sup>17</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Syahih Muslim*, Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2013, hlm. 361

Dengan turunnya surah An-Nuur ayat 2 dan penjelasan rasulullah ini maka hukum untuk pezina yang tercantum dalam surah An-Nisa' ayat 15-16 menjadi hapus, hal ini karena telah muncul hukum syar'i yang baru. Oleh karena itu hukuman untuk pezina berdasarkan surah An-Nuur ayat 2 dan hadits di atas dapat dirinci menjadi dua macam yaitu zina *ghairu muhshan* dan zina *muhshan*.<sup>18</sup>

a. Zina *ghairu muhshan*

Zina *ghairu muhshan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum pernah berkeluarga. Adapun hukuman untuk zina *ghairu muhshan* ini ada dua macam, yaitu di dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Hukuman dera sendiri adalah hukuman had, yang mana hukuman tersebut sudah ditentukan oleh syara'. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya, dan atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Disamping telah ditentukan oleh syara', hukuman dera merupakan hak Allah sehingga pemerintah atau individu tidak berhak memberikan pengampunan.<sup>19</sup>

Hukuman kedua bagi pelaku zina *ghairu muhshan* adalah pengasingan selama satu tahun. Hukuman ini didasarkan pada hadits Ubadah Ibnu Shamit tersebut

---

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 28

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 29-30

diatas. Akan tetapi para ulama' berbeda pendapat mengenai wajibnya pelaksanaan hukuman pengasingan tersebut. Menurut Imam Abu Hanifah hukum pengasingan tidak wajib dilaksanakan. Akan tetapi mereka membolehkan untuk dilaksanakan hukuman pengasingan jika hukuman tersebut dianggap sebagai maslahat. Dengan demikian menurut beliau, hukuman pengasingan itu bukan merupakan hukuman had, melainkan hukuman ta'zir.<sup>20</sup>

Sedangkan jumhur ulama' yang terdiri dari imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa hukuman pengasingan harus dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera seratus kali. Dengan demikian menurut jumhur, hukuman pengasingan ini termasuk hukuman had, dan bukan hukuman ta'zir. Dasarnya adalah hadits Ubadah ibn Shamit tersebut yang di dalamnya tercantum:

الْكُرُّ بِالْكُرِّ جَلْدُ مِائَةٍ وَ تَغْيِي سَنَةٍ

Artinya: Jejaka dengan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.<sup>21</sup>

Disamping hadits tersebut, jumhur juga beralasan dengan adanya tindakan para sahabat Rasulullah, yaitu Sayidina Umar dan Sayidina Ali yang melaksanakan

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 31

<sup>21</sup> Imam An-nawawi, *Syarah Syahih Muslim...*, hlm. 362

hukuman dera dan pengasingan ini, dan sahabatnya yang lain tidak ada yang mengingkarinya. Dengan demikian hal ini bisa disebut sebagai *ijma'*.<sup>22</sup>

Akan tetapi dalam hal pengasingan bagi wanita yang melakukan zina, para ulama' juga saling berbeda pendapat. Menurut imam Malik hukuman pengasingan hanya berlaku untuk laki-laki, sedangkan wanita tidak diberlakukan. Sebabnya adalah karena wanita itu perlu penjagaan dan pengawalan. Apabila wanita tersebut diasingkan bersama-sama dengan muhrim sebagai pengawalannya, maka hal ini berarti juga mengasingkan orang yang tidak melakukan perbuatan zina dan menghukum orang yang sebenarnya tidak berdosa.<sup>23</sup>

Lain halnya dengan madzhab Syafi'i, Hambali, Zhahir, yang berpendapat bahwa hukuman pengasingan berlaku kepada mereka semua yang telah melakukan zina *ghairu muhshan*, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini dikarenakan keumuman hadits yang menjelaskan tentang hukuman pengasingan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 31

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 31-32

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 32



b. Zina muhsan

Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah pernah menikah. Hukuman untuk pelaku zina muhsan ini ada dua macam, yaitu dera seratus kali dan rajam. Hukuman dera seratus kali ini didasarkan kepada Al-Qur'an surah An-Nuur ayat 2 dan hadits nabi yang telah dikemukakan diatas. Sedangkan hukuman rajam juga didasarkan kepada hadits nabi baik *qauliyah* maupun *fi'liyah*.<sup>25</sup> Hadits-hadits dimaksud antara lain :

1) Hadits Ubadah Ibn Ash-Shamit

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا. الْكُفْرُ بِالْكَفْرِ جُلْدُ مَا تَّةٌ وَ نَفْيُ سَنَةٍ وَالْثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جُلْدُ مَا تَّةٌ وَالرَّجْمُ (رواه الجماعة الا البخارى والنسائى).

Artinya: Dari Ubadah ibn Ash-shamit ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya allah telah memberikan jalan keluar (hukuman) bagi mereka (pezina). Jejaka dan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedngkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam.” (diriwayatkan oleh jama’ah kecuali bukhari dan nasa’i).<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 33

<sup>26</sup> Imam An-nawawi, *Syarah Syahih Muslim...*, hlm. 361

## 2) Hadits Jabir ibn Samurah

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا زَنَى بِأَمْرَأَةٍ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  
فَجَلَدَ الْحَدَّ ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ مُحْتَصَنٌ فَأَمَرَ بِهِ فَرَجِمَ (رواه أبو داود)

Artinya: Dari Jabir ibn Abdillah bahwa seorang laki-laki telah berzina dengan seorang perempuan. Kemudian nabi memerintahkan untuk membawanya ke hadapan Nabi saw. Lalu Nabi menjilidnya sesuai dengan ketentuan. Kemudian Nabi diberitahu bahwa ia sudah berkeluarga (beristri). Nabi memerintahkan untuk membawanya kembali, dan kemudian ia dirajam. (Hadits diriwayatkan oleh Abu Dawud).<sup>27</sup>

## 3) Hadits jabir ibn samurah

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَجِمَ مَا عَزَّ بِنِ  
مَالِكٍ وَلَمْ يَذْكُرْ جِلْدًا (رواه أحمد)

Artinya: Dari Jabir ibn Samurah bahwa Rasulullah saw. melaksanakan hukuman rajam terhadap Ma'iz ibn Malik, dan tidak disebut-sebut tentang hukuman jilid (dera). (Hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad).<sup>28</sup>

Berdasarkan hadits-hadits tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum rajam merupakan hukuman yang diakui dan diterima oleh hampir semua fuqaha sebagai hukuman

---

<sup>27</sup> Abu Dawud Sulaiman ibn Al-asy'ats As-Sajastani, *Sunan Abu Dawud*, Juz IV, Dar Al-Fikr, hlm. 151

<sup>28</sup> Muhammad Ibn Ali Asy-Syaukani, *nailul Al-Authar*, juz VII, Dar Al-Fikr, tanpa tahun, hlm. 249

untuk pelaku zina *muhsan*. Sedangkan dalam penggabungan hukuman *jilid* dan *rajam* terhadap pelaku zina *muhsan*, para ulama berbeda pendapat.

Menurut Imam Al-Hasan, Ishak, Ibn Mundzir, Golongan Zahiriyah, Syi'ah, Zaidiyah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, hukuman *jilid* atau dera seratus kali tetap dilaksanakan terhadap zina *muhsan* di samping dilaksanakannya hukuman *rajam*. Alasannya adalah sebagai berikut.

- a) Al-Qur'an menjadikan hukuman jilid sebagai hukuman asasi untuk *jarimah* zina, sebagaimana yang disebutkan dalam surah An-Nuur ayat 2. Lalu datanglah sunah yang menjelaskan tentang hukuman *rajam* bagi yang sudah berkeluarga dan hukuman pengasingan bagi yang belum berkeluarga. Dengan demikian maka hukuman *jilid* dan *rajam* wajib dilaksanakan kepada pelaku zina *muhsan*.
- b) Sayyidina Ali pernah melaksanakan penggabungan antara hukuman *jilid* dan *rajam* ketika beliau menjilid Syurah pada hari Kamis dan merajamnya pada hari Jumat dan beliau berkata: "Saya menjilidnya berdasarkan kitabullah dan merajamnya berdasarkan sunnah rasulullah".<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Ahmaad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 34

Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan satu riwayat dari imam ahmad, hukuman untuk zina *muhsan* cukup dengan rajam saja dan tidak digabung dengan jilid. Alasannya adalah:

- a) Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir ibn Samurah

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ مَا عَزَبَ مَالِكٍ وَمَا يَذْكُرُ جِلْدًا (رواه أحمد)

Artinya: dari Jabir ibn Samurah bahwa Rasulullah saw. Melaksanakan hukuman rajam atas diri Ma'iz ibn Malik, dan tidak disebut-sebut tentang hukuman *jilid*. (Hadits diriwayatkan oleh imam ahmad).<sup>30</sup>

- b) Rasulullah saw. Melakukan hukuman rajam atas diri wanita ghamidiah dan dua orang yahudi, dan tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah menjilid salah seorang dari mereka.
- c) Alasan yang ketiga adalah, jika ditinjau dari segi tujuan hukum, hukuman yang lebih ringan terserap oleh hukuman yang lebih berat karena tujuan hukuman adalah untuk pencegahan. Apabila hukuman dera digabungkan dengan hukuman rajam maka

---

<sup>30</sup> Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani, *Nailul Al-Authar*, juz VII..., hlm. 249

hukuman tersebut tidak ada arti dan pengaruhnya terhadap pencegahan.<sup>31</sup>

#### 4. Pembuktian Jarimah Zina

Perbuatan zina dapat dikenai hukuman had apabila perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan. Adapun cara pembuktian dalam jarimah zina yaitu ada tiga macam:

##### a. Pembuktian dengan saksi

Para ulama' telah menyepakati bahwa jarimah zina tidak bisa dibuktikan kecuali dengan empat orang saksi. Apabila saksi dalam perzinaan tersebut kurang dari empat orang saksi maka kesaksian tersebut tidak dapat diterima. Hal ini apabila pembuktian dalam kasus perzinaan tersebut hanyalah berupa saksi semata dan tidak ada bukti-bukti yang lain. Dasar dari pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

##### 1) Surah An-Nisa" ayat 15

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَجْشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا  
عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ط

Artinya: Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya).<sup>32</sup>

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 249

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*..., hlm. 80

## 2) Surah An-Nuur ayat 4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ  
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.<sup>33</sup>

## 3) Surah An-Nuur ayat 13

لَوْلَا جَاءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ  
فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Olah Karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi Maka mereka Itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 350

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 351

#### 4) Hadits Nabi saw

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَوَّلُ لِعَانٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ شَرِيكَ  
 بَنٍ سَحْمَاءَ قَذَفَهُ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ بِأَمْرَاتِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
 الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا فَحَدُّ فِي ظَهْرِكَ (الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ)

Artinya: Dari Anas ibn Malik ra. Ia berkata: Li'an pertama yang terjadi dalam Islam adalah bahwa Syarik ibn Sahma dituduh oleh Hilal ibn Umayyah berzina dengan istrinya. Maka Nabi bersabda kepada Hilal: "Ajukanlah saksi. Apabila tidak maka engkau dikenakan hukuman had." (Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Ya'la dan perawinya dapat dipercaya).<sup>35</sup>

Akan tetapi tidak setiap orang dapat diterima sebagai saksi. Yang diterima sebagai saksi adalah orang-orang yang memenuhi syarat-syarat yang terdiri dari dua macam. Pertama syarat yang umum, yaitu syarat yang berlaku untuk persaksian dalam semua jarimah. Syarat-syarat umum itu sendiri meliputi baligh (dewasa), berakal, kuat ingatan, dapat berbicara, dapat melihat, adil, Islam, dan tidak ada penghalang persaksian. Kedua yaitu syarat yang khusus, yaitu terdiri dari laki-laki, al-ishalah, peristiwa zina belum kadaluarsa, persaksian harus dalam satu majelis, bilangan saksi harus empat orang,

---

<sup>35</sup> Muhammad ibn Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, juz IV, Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, Mesir cetakan IV, 1960, hlm. 16

persaksian harus meyakinkan, diterima, dan dianggap sah oleh hakim.<sup>36</sup>

b. Pembuktian dengan pengakuan

Pengakuan juga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam jarimah perzinaan, dengan syarat-syarat sebagai berikut.

- 1) Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, pengakuan harus dinyatakan sebanyak empat kali. Hal ini berdasarkan dengan hadits Ma'iz yang menjelaskan tentang pengakuan sebanyak empat kali di hadapan Rasulullah saw, bahwa ia telah melakukan perbuatan zina. Akan tetapi Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengakuan itu cukup satu kali saja tanpa diulang-ulang. Alasannya adalah bahwa pemberitahuan tidak akan bertambah dengan cara diulang-ulang.<sup>37</sup>
- 2) Pengakuan harus terperinci dan menjelaskan tentang hakikat perbuatan, sehingga dapat menghilangkan syubhat (ketidak jelasan) dalam perbuatan zina tersebut.<sup>38</sup> Hal ini berdasarkan kepada sunnah Rasulullah saw. Ketika Ma'iz datang kepada

---

<sup>36</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 49-52

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 53

<sup>38</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CCV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 5



Rasulullah saw. menyatakan pengakuannya, Rasulullah saw. Menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ma'iz: apakah engkau (Ma'iz) tidak gila, atau minum minuman keras, barangkali engkau hanya menciumnya, atau hanya tidur bersama, dan pertanyaan-pertanyaan lain termasuk perihal persetubuhannya.<sup>39</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan harus terinci dan jelas.

- 3) Pengakuan harus sah atau benar, oleh karena itu pengakuan harus berasal dari orang yang berakal dan mempunyai kebebasan (tidak dipaksa).<sup>40</sup> Hal ini didasarkan kepada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّيِّ حَتَّى يَكْبُرَ.

Artinya: Dari Aisyah ra. Ia berkata: Rasulullah saw telah bersabda: dihapuskan ketentuan hukum dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia

---

<sup>39</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 53

<sup>40</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 5

sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa.<sup>41</sup>

- 4) Imam Abu Hanifah mensyaratkan bahwa pengakuan harus dinyatakan dalam sidang pengadilan. Apabila pengakuan tidak dilaksanakan dalam sidang pengadilan maka pengakuan tersebut tidak diterima. Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad tidak mensyaratkannya. Dengan demikian, menurut mereka pengakuan itu boleh dinyatakan diluar pengadilan.<sup>42</sup>

c. Pembuktian dengan *qarinah*

*Qarinah* adalah tanda yang dianggap sebagai alat bukti dalam jarimah zina, yaitu dengan timbulnya kehamilan pada seorang wanita yang tidak bersuami, atau tidak diketahui suaminya. Disamakan juga dengan wanita yang tidak bersuami yaitu wanita yang telah menikah dan melahirkan sebelum enam bulan masa pernikahan.<sup>43</sup>

Dasar penggunaan *qarinah* sebagai alat bukti untuk *jarimah* zina adalah ucapan sahabat dan perbuatannya. Dalam salah satu pidatonya Sayidina Umar RA. berkata:

---

<sup>41</sup> Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani, *Nailul Al-Authar*, juz VII..., hlm. 249

<sup>42</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 54

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 55

وَ إِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَى مَنْ زَنَا إِذَا أُخْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْخُبْلُ أَوْ إِلَّا غَيْرَافُ (متفق عليه)

Artinya: Dan sesungguhnya rajam dilaksanakan berdasarkan kitabullah atas orang yang berzina, baik laki-laki maupun perempuan apabila ia muhsan, jika terdapat keterangan (saksi) atau terjadi kehamilan, atau ada pengakuan. (Muttafaq alaih).<sup>44</sup>

Yang diucapkan diatas adalah ucapan sahabat, tetapi karena tidak ada yang menentanginya maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai *ijma'*. Akan tetapi sebenarnya kehamilan semata-mata bukan merupakan *qarinah* yang pasti atas terjadinya zina, karena mungkin saja kehamilan tersebut terjadi akibat perkosaan. Oleh karena itu, apabila terdapat syubhat dalam terjadinya zina tersebut maka hukuman *had* menjadi hapus.<sup>45</sup>

## 5. Pelaksanaan Had Zina

Apabila tindak pidana perzinaan sudah bisa dibuktikan dan tidak ada *syubhat* maka hakim harus memutuskannya dengan menjatuhkan hukuman had. Adapun cara-cara dalam pelaksanaan hukuman had adalah sebagai berikut:

- a. Siapa yang melaksanakan hukuman

---

<sup>44</sup> Muhammad ibn Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, juz IV..., hlm. 8

<sup>45</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 56

Para fuqaha telah sepakat bahwa pelaksanaan hukuman had harus dilakukan oleh imam atau wakilnya. Hal ini disebabkan hukuman had merupakan hak Allah. Kehadiran imam tidak menjadi syarat dalam pelaksanaan hukuman. Karena dalam beberapa hadits menyebutkan bahwa Rasulullah saw. selalu melaksanakan hukuman had kepada para sahabat dan beliau tidak menghadiri pelaksanaan hukuman tersebut. Akan tetapi, persetujuan imam selalu diperlukan dalam melaksanakan hukuman ini.<sup>46</sup>

b. Cara pelaksanaan hukuman *rajam*

Hukuman *rajam* adalah hukuman yang dilakukan dengan cara melempar batu atau sejenisnya kepada orang yang telah melakukan zina *muhsan* sampai meninggal. Dalam pelaksanaannya jika yang akan *dirajam* adalah laki-laki, maka hukuman dilaksanakan dengan berdiri tanpa dimasukkan kedalam lubang dan tanpa dipegang atau diikat. Apabila yang akan *dirajam* melarikan diri dan dalam pembuktiannya hanya dengan pengakuan, maka ia tidak perlu dikejar dan hukuman dihentikan. Akan tetapi, jika pembuktiannya dengan saksi maka ia harus dikejar,

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 57

dan hukuman *rajam* diteruskan sampai ia meninggal dunia.<sup>47</sup>

Apabila yang *dirajam* adalah seorang wanita, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i boleh di pendam sampai batas dada, karena dengan cara demikian akan bisa menutupi auratnya. Berbeda dengan pendapat Imam Maliki dan pendapat yang *rajih* dalam mazhab Hambali, yang menyebutkan bahwa wanita tidak dipendam, seperti halnya hukuman *rajam* terhadap laki-laki.<sup>48</sup>

Hukuman *rajam* dapat dilaksanakan pada setiap saat dan musim, baik pada musim panas maupun dingin, dalam keadaan sehat ataupun sakit, karena hukuman ini berakhir pada kematian. Akan tetapi, apabila wanita yang dihukum adalah wanita yang sedang hamil, maka pelaksanaan hukuman ditunda sampai ia melahirkan.<sup>49</sup>

c. Cara pelaksanaan hukuman dera

Hukuman dera dilaksanakan dengan menggunakan cambuk, pukulan dilakukan sebanyak 100 kali cambukan. Cambuk yang digunakan disyaratkan harus kering, tidak boleh basah karena bisa menimbulkan luka. Disamping itu cambuk tersebut ekornya tidak boleh lebih dari satu.

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 58

<sup>48</sup> *ibid*, hlm. 58

<sup>49</sup> *Ibid*

Apabila ekor cambuk lebih dari satu, maka pukulan dihitung sesuai dengan banyaknya ekor cambuk tersebut.<sup>50</sup>

Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, apabila yang dihukum cambuk adalah laki-laki maka bajunya harus dibuka kecuali yang menutupi auratnya. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, orang yang terhukum tetap dalam keadaan berpakaian. Sedangkan posisi orang yang dihukum cambuk menurut Imam Malik harus dalam keadaan duduk tanpa dipegangi, kecuali ia menolak atau melawan. Namun menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, apabila orang yang dihukum laki-laki maka ia dihukum dalam keadaan berdiri, dan apabila perempuan maka hukuman dilaksanakan dalam keadaan duduk.<sup>51</sup>

d. Cara Pelaksanaan Hukuman Pengasingan

Para *fuqaha* berselisih mengenai cara pelaksanaan hukuman pengasingan. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Syi'ah Zaidiyah, pengasingan itu pengertiannya adalah penahanan atau dipenjarakan. Oleh karena itu pelaksanaan hukuman tersebut dengan cara menahan atau memenjarakan ditempat lain di luar tempat terjadinya perbuatan zina tersebut.

---

<sup>50</sup> *ibid*

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 58-59

Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, pengasingan berarti membuang (mengasingkan) pelaku dari daerah terjadinya perbuatan zina ke daerah lain dengan pengawasan dan tanpa dipenjarakan. Tujuan pengawasan tersebut agar pelaku pezinaan tidak kabur kembali ke daerah asalnya. Walaupun demikian, Imam Syafi'i memperbolehkan adanya penahanan di tempat pengasingan apabila dikhawatirkan ia akan melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya.<sup>52</sup>

Apabila orang yang terhukum melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya, ia harus dikembalikan ke tempat pengasingannya dan masa pengasingannya dihitung kembali mulai sejak pengembaliannya tanpa menghiraukan masa pengasingan yang sudah dilaksanakan sebelum melarikan diri. Akan tetapi dari kelompok Hambaliyah berpendapat bahwa masa pengasingan yang telah dilaksanakan sebelum ia kabur tetap diperhitungkan.<sup>53</sup>

Apabila orang yang dihukum di dalam tempat pengasingan melakukan zina lagi, maka ia di dera seratus kali dan diasingkan ke tempat yang lain, dengan perhitungan masa pengasingan yang baru tanpa menghiraukan masa pengasingan lama yang belum

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 32

<sup>53</sup> *ibid*, hlm. 32

selesai. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Tetapi kelompok Zhahiriyyah berpendapat bahwa orang yang terhukum harus menyelesaikan sisa masa pengasingannya yang lama, setelah itu baru dimulai dengan masa pengasingan yang baru.<sup>54</sup>

## **B. Hubungan Seksual Di Luar Pernikahan (Zina) Dalam KUHP**

Hubungan seksual di luar pernikahan atau biasa disebut sebagai zina adalah perbuatan yang telah diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana, yaitu terdapat di dalam Pasal 284, Pasal 286 dan Pasal 287 sebagai berikut

### **1. Pasal 284 KUHP**

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

Ke-1 a. seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.

b. seorang wanita telah menikah yang melakukan zina.

Ke-2 a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah.

---

<sup>54</sup> *Ibid*



- b. seorang wanita yang telah menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan rancangan karena alasan itu juga.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.<sup>55</sup>

Dari ketentuan Pasal 284 KUHP tersebut di atas, dapat ditarik penjelasan sebagai berikut:

- a. Zina menurut pasal 284 KUHP adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau

---

<sup>55</sup> IKAPI, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Fokus Media, 2012, hlm. 340-341

suaminya. Agar masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota (kemaluan) laki-laki harus masuk kedalam anggota (vagina) perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

- b. Pasal 284 KUHP membedakan antara mereka yang tidak tunduk pada pasal 27 BW, ialah orang Eropa yang disamakan dengan mereka, dan mereka yang tunduk pada pasal 27 BW (orang yang beragama Islam dsb). Pasal 27 BW mengatakan, bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikah bersama dengan seorang perempuan dan seorang perempuan hanya boleh menikah dengan seorang laki-laki sebagai suaminya. Mereka yang tunduk pada pasal ini, baik laki-laki maupun perempuannya tidak boleh bersetubuh dengan orang lain. Selain dengan istri atau suaminya sendiri.
- c. Pasal ini adalah suatu delik aduan yang absolut, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan (dimalukan). Pengaduan ini tidak boleh dibelah maksudnya pengaduan

pihak yang dirugikan itu berlaku bagi kedua pihak yang merugikannya yaitu pasangan zinanya.<sup>56</sup>

2. Pasal 285 KUHP

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.<sup>57</sup>

3. Pasal 286 KUHP

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.<sup>58</sup>

4. Pasal 287 KUHP

- a. Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

---

<sup>56</sup> Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana DI Indonesia*, Semarang: Walisongo Pers, 2008, hlm. 7-8

<sup>57</sup> IKAPI, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...*, hlm. 338

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 339-340

- b. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.<sup>59</sup>

Dari penjelasan Pasal 287 diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang dapat dikategorikan sebagai pelaku zina, yaitu jika melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan, yang diketahui aau sepatutnya harus diketahui bahwa perempuan tersebut belum berumur lima belas tahun. Jika perempuan tersebut umurnya tidak jelas, maka dapat diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa perempuan tersebut belum waktunya untuk dinikah. Perbuatan sesuai dengan Pasal 287 tersebut memang tidak ada pemaksaan terhadap perempuan yang disetubuhinya atau perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, tetapi ia lakukan dengan perempuan yang belum berumur lima belas tahun maka perbuatan tersebut di ancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 340

<sup>60</sup> Neng Djubaeda, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia DI Tinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 66

### BAB III

## TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PROSPEK DELIK ZINA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA INDONESIA

### A. Problem Penegakan Delik Zina di Indonesia

Hukum Islam adalah peraturan atau ketetapan dari Allah SWT melalui Rasul-Nya, baik dalam bentuk tuntutan, larangan, maupun petunjuk untuk menciptakan suasana kedamaian, ketenangan dan terhindar dari kemafsadatan lainnya.<sup>1</sup> Pedoman utama Hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Hadits. hal ini dijelaskan dalam ayat 48 surah Al-Maidah:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ  
وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا  
جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ

Artinya: dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya yaitu kitab-kitab (yang di turunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab dilain itu maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa

---

<sup>1</sup> Baharudin Ahmad dan Illi Yanti, *Eksistensi Dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 5

nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. (QS. Al-Maa'idah: 48).<sup>2</sup>

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa, Allah telah menurunkan Al-Qur'an untuk dijadikan pedoman dan petunjuk umat manusia dalam memutuskan berbagai perkara agar menjadi lebih baik dalam urusan apapun. Selain itu ayat di atas menjelaskan kepada kita tentang adanya kewajiban untuk menerapkan dan melaksanakan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an. Kewajiban tersebut ditugaskan kepada Rasulullah dalam fungsi rangkapnya sebagai *ulil amri* untuk disampaikan kepada umat manusia.<sup>3</sup>

Setiap umat Islam diwajibkan untuk menjalankan pola kehidupan yang Islami, yaitu kehidupan yang sinkron dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadits, oleh karena itu kita tidak bisa semena-mena melakukan tindakan dengan sesuka hati kita. Karena semua umat manusia wajib hukumnya mempertimbangkan dengan akal sehat setiap langkah dan perilakunya, sehingga dapat memisahkan antara perilaku yang dibenarkan dengan perbuatan yang disalahkan. Karena semua tindakan kita harus bisa dipertanggung jawabkan dengan hukum.<sup>4</sup>

Salah satu yang dibahas dalam hukum Islam adalah *jarimah* zina. *Jarimah* zina sesuai dengan yang dijelaskan di dalam bab II

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Quran, 2009, hlm. 116

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 2

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 3

adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang tidak terikat di dalam pernikahan. Dalam hukum pidana Islam, jarimah zina dibedakan menjadi dua kategori yaitu zina *ghairu muhshan* dan zina *muhshan*, berikut penjelasan dari kedua zina tersebut:

1. Zina *ghairu muhshan* yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk zina ini adalah di dera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.
2. Zina *muhshan* yaitu zina yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristri). Hukuman untuk pelaku zina ini adalah didera seratus kali dan dirajam.<sup>5</sup>

Akan tetapi Negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sampai saat ini belum bisa menegakkan perintah Allah dalam melaksanakan hukum pidana Islam terutama terkait dengan perzinaan. Hal ini dikarenakan Indonesia telah memiliki peraturan hukum pidana sendiri yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perzinaan (perbuatan cabul) terdapat di dalam beberapa Pasal, dimana pasal-pasal tersebut berlaku untuk seluruh penduduk Indonesia. Menurut Pasal 284 KUHP zina adalah hubungan seksual atau

---

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 29-33

persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.

Selain dalam Pasal 284 yang dijelaskan di atas, hubungan seksual yang dapat dikategorikan sebagai zina adalah orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan yaitu sesuai dengan Pasal 285 KUHP dan orang yang melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, yaitu sebagaimana yang ada didalam Pasal 286 KUHP. Dalam pasal 287 KUHP juga menjelaskan bahwa orang yang melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga olehnya, bahwa perempuan bersangkutan belum berumur 15 (lima belas) tahun. Perempuan yang kondisinya telah disebutkan diatas menentukan larangan yang sama, meskipun hukumannya berbeda.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan persetubuhan di luar perkawinan yang dapat dimasukkan kedalam perbuatan zina adalah:

1. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau

---

<sup>6</sup> Neng Djubaeda, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. . . , hlm. 66-67



salah seorang pelakunya sedang dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain.

2. Persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap wanita di luar nikah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
3. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan pingsan.
4. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan tidak berdaya.
5. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga belum berumur 15 tahun.
6. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga belum masanya untuk dikawini.<sup>7</sup>

Perbedaan dalam peraturan hukum pidana di Indonesia dengan hukum pidana Islam sesuai dengan yang dijelaskan di atas, dikarenakan Negara Indonesia memiliki sistem hukum nasional sendiri, yaitu berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang diwujudkan melalui politik hukum nasional. Sistem hukum tersebut bersumber dan berakar pada berbagai sistem hukum yang digunakan oleh masyarakat Indonesia yaitu meliputi sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Eropa.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 68

Ketiga sistem hukum tersebut menjadi bahan baku dalam pembentukan sistem hukum nasional yang holistic dan komprehensif melalui politik hukum nasional.<sup>8</sup>

Adapun di dalam politik hukum di Indonesia, pengambilan kebijakan harus melalui lembaga Negara atau pejabat yang diberi wewenang didalam menetapkan hukum mana yang harus diganti, diubah, dan dipertahankan, atau menetapkan hukum baru mana yang perlu diatur, sehingga dengan kebijakan tersebut penyelenggaraan Negara dan pemerintah dapat berjalan dengan baik dan tertib.<sup>9</sup>

Dalam rangka membangun sistem hukum nasional tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan dengan menggunakan tiga sistem hukum di atas sebagai bahan bakunya yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Eropa. Ditinjau dari aspek politik hukum di Indonesia, hukum nasional yang digunakan adalah hukum yang berlaku bagi semua warga Negara Indonesia tanpa membedakan dari dasar primordialisme.<sup>10</sup> Sehingga hukum nasional diharapkan dapat menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia berdasarkan

---

<sup>8</sup> Otong Rosyadi, dan Andi Daswan, *Study Politik Hukum*, Yogyakarta: Thafa Media, 2013, hlm. 89

<sup>9</sup> Amran Suadi, dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016, hlm. 1

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 2

keadilan dan kebenaran yang sesuai dengan kondisi masyarakat di Indonesia.

Oleh karena itu, politik hukum nasional harus selaras dengan tujuan Negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta memelihara ketertiban negara. Sehingga dapat memberi arah pembangunan hukum yang sesuai dengan budaya bangsa dan keyakinan didalam kehidupan masyarakat.<sup>11</sup>

Akan tetapi dari ketiga sistem hukum yang dijelaskan di atas, hanya hukum Eropalah yang dijadikan acuan dalam peraturan hukum pidananya. Hal ini didasarkan dari pernyataan Drs. H. Eman Sulaiman, MH di dalam bukunya, bahwa teks resmi KUHP adalah teks yang ditulis dalam bahasa belanda. Teks yang tercantum dalam KUHP yang disusun oleh Moeljanto, R. soesilo dan lain-lain itu merupakan terjemahan belaka, bukan terjemahan resmi yang disyaratkan oleh undang-undang.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, Pasal tentang perzinaan di dalam KUHP dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan masyarakat Indonesia yang religius dan mayoritas memeluk agama Islam. Bukan hanya agama Islam saja yang menganggap perbuatan zina

---

<sup>11</sup> Ahmad Muliadi, *Politik Hukum*, Padang: Akademia Permata, 2013, hlm. 47

<sup>12</sup> Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. . . , hlm. 3

itu termasuk perbuatan yang tercela dan dianggap sebagai perbuatan pidana yang harus dikenai hukuman berat bagi orang yang melakukannya, agama yahudi sebagaimana yang diatur dalam kitab Taurat dan Nasrani di dalam kitab Injilnya pun memandang perzinaan sebagai sebuah perbuatan keji yang karenanya harus dihukum berat, yakni di lempari batu hingga mati.<sup>13</sup>

Selain itu Pasal-pasal tentang perzinaan di dalam KUHP sangat tidak efektif dalam menanggulangi permasalahan perzinaan. Hal ini dapat dilihat dari adanya tempat prostitusi yang masih digunakan sebagai lahan bisnis bagi orang-orang tertentu. Demikian juga perzinaan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadikan dirinya sebagai pelacur yang sudah dianggap hal yang biasa saja oleh masyarakat Indonesia, bahkan saat ini selalu diupayakan bahwa pelacuran adalah suatu profesi yang para pelakunya dilindungi dan diperjuangkan sebagai Hak Asasi Manusia. Oleh sebab itu para pelaku zina yang disertai dengan pembayaran tertentu itu tidak lagi disebut sebagai pelacur, tetapi disebut sebagai PSK (pekerja seks komersial).<sup>14</sup>

Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan bahwa problem penegakan *jarimah* zina di Indonesia salah satunya

---

<sup>13</sup> Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia...*, hlm. 10

<sup>14</sup> Neng Djubaeda, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam...*, hlm. 2

adalah masih banyaknya masyarakat Indonesia yang acuh terhadap pelacuran atau prostitusi yang ada di Indonesia. Selain itu pandangan budaya Barat yang menganggap bahwa delik aduan dalam perzinaan adalah *individualistic liberalistic*, menjadikan perzinaan hanya dipandang bersifat pribadi (sangat privat).<sup>15</sup> Sehingga pemikiran tersebut telah mempengaruhi sebagian orang Indonesia yang bergerak dibidang kemasyarakatan, atau yang duduk di pemerintahan, maupun yang duduk sebagai wakil rakyat Indonesia, atas dasar memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>16</sup>

## **B. Prospek Delik Zina di Indonesia**

Perzinaan jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam adalah hubungan seksual di luar perkawinan yang dilakukan oleh orang yang telah kawin ataupun oleh orang yang belum kawin.<sup>17</sup> Akan tetapi perzinaan di Negara Indonesia sebagaimana yang di paparkan di dalam KUHP Pasal 284, adalah hubungan seksual di luar perkawinan yang para pelaku atau salah satu pelakunya adalah orang yang telah terikat dalam perkawinan, Jika pria dan wanita yang sama-sama lajang melakukan hubungan seksual diluar kawin, maka hubungan seksual tersebut bukan merupakan

---

<sup>15</sup> Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia...*, hlm. 8

<sup>16</sup> Neng Djubaeda, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam. . .*, hlm. 2

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam. . .*, hlm. 3

tindak pidana zina. Selain itu pelaku tindak perzinaan di Indonesia tidak dapat dituntut pidana apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan, karena di Indonesia perzinaan adalah termasuk kedalam delik aduan absolut.<sup>18</sup>

Ketentuan perzinaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti yang dijelaskan di atas, belum terlalu efektif dalam mengatasi masalah perzinaan yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dari maraknya kasus perzinaan di negara Indonesia. Bahkan para pelaku tidak merasa bersalah sedikitpun setelah melakukan perbuatan zina tersebut. Sehingga kepedulian masyarakat terhadap nilai kesusilaan sudah sedikit mulai menurun.

Kerap sekali seseorang telah mengaku berbuat zina dengan terang-terangan dan menginfokan di dalam media, mereka melakukan perbuatan tersebut dengan dalih kejujuran dan ketidakmunafikan. Sikap tersebut merupakan indikasi atau tanda keberhasilan ajaran zina yang terkandung dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah berlaku dan sah untuk hukum di Indonesia. Dimana menurut pasal tersebut, persetubuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang sama-sama

---

<sup>18</sup> Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. . . , hlm. 7-8

dewasa, sama-sama suka dan dengan sengaja tidak dianggap sebagai tindak pidana perzinaan.<sup>19</sup>

Lebih parahnya lagi perzinaan di Indonesia dijadikan sebagai lahan bisnis yang dianggap menguntungkan bagi orang-orang tertentu. Demikian juga perzinaan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadikan dirinya sebagai pelacur yang sudah dianggap hal yang biasa saja oleh masyarakat Indonesia, bahkan saat ini selalu diupayakan bahwa pelacuran adalah suatu profesi yang para pelakunya dilindungi dan diperjuangkan sebagai Hak Asasi Manusia. Oleh sebab itu para pelaku zina yang disertai dengan pembayaran tertentu itu tidak lagi disebut sebagai pelacur, tetapi disebut sebagai PSK (pekerja seks komersial). Pergeseran nilai dan peran terhadap pandangan pelacuran yang berubah menjadi PSK, tidak lepas dari pemikiran dan budaya barat yang mempengaruhi sebagian orang-orang di Indonesia.<sup>20</sup>

Begitu pula dengan delik aduan absolut yang terkandung didalam Pasal 284 KUHP. Menurut Barda Nawawi Arif, delik aduan absolut tersebut ada di dalam pasal 284 KUHP dilatar belakangi oleh pandangan Barat yang *individualistic-liberalistik*, sehingga perzinaan hanya dipandang bersifat pribadi (sangat

---

<sup>19</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam...*, hlm. 1-2

<sup>20</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam...*, hlm. 2

privat).<sup>21</sup> Begitu juga menurut Harkristuti Markrusnowo, rumusan KUHP tentang delik perzinaan seperti yang telah dijelaskan di atas, lebih mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat di Eropa daripada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia.<sup>22</sup>

Padahal karakteristik masyarakat Eropa seperti yang dijelaskan diatas sangat berbeda dengan karakteristik masyarakat di Negara Indonesia, menurut Eman Sulaeman masyarakat Indonesia yang lebih bersifat kekeluargaan, kolektifitas, monodualistik, sehingga permasalahan perzinaan bukanlah masalah yang dianggap privat tetapi juga dianggap sebagai permasalahan sosial, sehingga kurang bijaksana jika delik perzinaan hanya dijadikan sebagai delik aduan absolut saja.<sup>23</sup>

Dengan penjelasan-penjelasan diatas dapat dipahami bahwa permasalahan dalam delik perzinaan di dalam KUHP ini tidak semata-mata terletak dalam aspek delik aduan absolutnya. Rumusan tentang deliknya pun tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan masyarakat Indonesia yang religius dan mayoritas memeluk agama Islam.

Kehidupan masyarakat yang terus berkembang secara dinamis, memunculkan ragam tuntutan untuk melakukan berbagai

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, 1996, hlm. 317

<sup>22</sup> Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. . . , hlm. 8

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 8



perubahan ke arah yang lebih baik, terutama dalam hukum pidana yang ada di Indonesia. Barda Nawawi Arif telah merumuskan bahwa untuk memperbarui hukum pidana harus meninjau dari aspek-aspek sosio politik, sosio filosofik, dan sosio kultural.<sup>24</sup> Sedangkan menurut Soedarto, ada tiga alasan mengapa KUHP perlu untuk diperbarui, yaitu: alasan politik, sosiologis, dan praktis.<sup>25</sup>

Dipandang dari sudut politik, Negara Indonesia yang telah merdeka sangat wajar untuk memiliki KUHP yang dibuat sendiri. KUHP yang dibuat sendiri bisa dipandang sebagai symbol dan merupakan kebanggaan tersendiri oleh suatu Negara yang telah merdeka. Sedangkan KUHP yang dipaksakan untuk diperlakukan di Negara lain, adalah bisa dipandang sebagai suatu symbol penjajahan dari Negara yang membuat KUHP tersebut. Contohnya adalah di Negara Belanda, yaitu pada saat tahun 1811 dimana belanda dijajah oleh Prancis, walaupun Belanda memiliki KUHP, akan tetapi Code Penal Perancis dinyatakan berlaku untuk rakyat Belanda pada saat itu.<sup>26</sup>

Alasan kedua adalah alasan yang dipandang dari sudut sosiologis, seperti yang dijelaskan di atas, pengaturan dalam

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. . , hlm. 30

<sup>25</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 66

<sup>26</sup> Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia...*, hlm. 2

hukum pidana merupakan pencerminan dari ideology politik suatu bangsa dimana hukum itu berkembang, ini berarti nilai-nilai sosial dan kebudayaan dari bangsa itu mendapat tempat dalam pengaturan hukum pidananya. Ukuran untuk menganggap suatu perbuatan itu criminal adalah tergantung dari nilai-nilai dan pandangan kolektif dari masyarakat tentang apa yang dianggap baik, benar, bermanfaat, dan sebaliknya. Jadi pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang kesusilaan dan agama sangat berpengaruh dalam pembentukan hukum, khususnya hukum pidana.<sup>27</sup>

Alasan terakhir mengapa KUHP sekarang ini harus segera diganti ialah merupakan alasan yang dipandang dari sudut praktek sehari-hari. Tidak banyak orang yang menyadari bahwa teks KUHP yang berlaku di Indonesia adalah berbahasa Belanda. Teks yang tercantum didalam KUHP yang disusun oleh Moeljanto, R. soesilo, dan lain-lain itu merupakan terjemahan belaka, bukan terjemahan resmi yang disahkan oleh suatu undang-undang. Sehubungan dengan kenyataan bahwa teks resmi KUHP adalah berbahasa Belanda, maka sebenarnya apabila hendak menerapkan KUHP tersebut secara tepat, maka masyarakat Indonesia harus mengerti bahasa Belanda. Karena hal ini tidak mungkin untuk diharapkan terhadap bangsa yang sudah merdeka dan memiliki

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 2-3

bahasa nasional sendiri, maka pembaharuan KUHP merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar.<sup>28</sup>

Perubahan tersebut tentu saja tidak boleh terpisah dari kerangka sistem hukum nasional yang dibangun berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam masyarakat Indonesia yang beragam, hukum senantiasa hidup dan berkembang sejalan dengan dinamika perkembangan suatu masyarakat, baik dari sosiokultural maupun politik.<sup>29</sup>

Menurut Kartini Kartono, perzinaan adalah masalah sosial yang cukup serius, karena perzinaan dianggap melanggar kesopanan, merusak keturunan, menyebabkan penyakit kotor, menyebabkan persengketaan dan ketidak rukunan dalam keluarga, dan hal-hal negatif lainnya. Oleh karena itu di Negara Indonesia memerlukan regulasi atau pengaturan terhadap penyelenggaraan perzinaan yang baru. Karena dalam Pasal 284 dianggap masih belum bisa mengatur permasalahan perzinaan yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia.<sup>30</sup>

Oleh karena itu ada beberapa rancangan undang-undang yang membahas tentang perubahan hukum pidana di Indonesia, salah satunya adalah Pasal 483 RUU KUHP tahun 2013 yaitu sebagai berikut :

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 3

<sup>29</sup> Amran Suadi, dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah...*, hlm. 4

<sup>30</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 196-197

1. Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:
  - a. Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya,
  - b. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya,
  - c. Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan,
  - d. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan, atau
  - e. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.
2. Tindak pidana sebagai dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar.

3. Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan pasal 25, pasal 26, dan pasal 28.
4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di siding pengadilan belum dimulai.<sup>31</sup>

Dalam pasal ini terjadi peluasan tentang pengertian zina. Jika di dalam KUHP pasal 284 menjelaskan bahwa yang termasuk kedalam zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya dan persetubuhan tersebut harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.<sup>32</sup> Sedangkan dalam pasal 483 RUU KUHP pengertian zina diperluas mencakup juga laki-laki dan perempuan yang masing-masing belum terikat dalam perkawinan yang sah dan melakukan persetubuhan.

Baik KUHP maupun RUU KUHP mengategorikan perzinaan sebagai delik aduan. Apabila dalam KUHP yang berhak mengadukan adalah suami atau isteri yang merasa tercemar atau

---

<sup>31</sup> Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2013, Diakses di [https://antikorupsi.org/sites/default/files/doc/RUU%20KUHP\\_2013.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/doc/RUU%20KUHP_2013.pdf) Pada 20 April 2019 Pukul 20.40 WIB

<sup>32</sup> Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. . . , hlm. 9

dirugikan, maka dalam RUU KUHP ditambah "pihak ketiga yang tercemar" sebagai pihak yang boleh mengadu.

Revisi mengenai tindak pidana zina di dalam RUU KHP Pasal 483 adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Refisi terhadap sanksi pidana penjara yaitu yang semula paling lama 9 (Sembilan) bulan menjadi paling lama 5 (lima) tahun.
2. Revisi terhadap pelaku perzinaan yaitu yang semula pelaku perzinaan adalah hanya laki-laki menikah dan perempuan menikah melakukan hubungan seks bukan dengan istri atau suaminya maka dalam RUU KUHP juga meliputi laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah dengan orang lain.

Menurut Zul Anwar Ajim, ketentuan yang tersebut diatas merupakan adopsi dari pandangan hukum pidana Islam mengenai zina. Ketentuan ini juga merupakan tindakan yang lebih bermaslahat untuk menghindarkan muda-mudi melakukan tindakan perzinaan. Kemaslahat yang ingin diraih dalam hal ini yaitu terpeliharanya kejelasan keturunan manusia (*hifz al-nasl*).<sup>34</sup>

Dalam konsep RUU KUHP tentunya mengenai pembedaannya masih berbeda jika dibandingkan dengan hukum

---

<sup>33</sup> Zul Anwar Ajim, "Formulasi Tindak Pidana Zina Dalam RUU KUHP Indonesia Dan Sumbangan Hukum Islam Terhadapnya" jurnal reformasi tindak pidana zina, IAIN Pandang Sidimpuan, 2015, hlm. 22-23

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm. 22

pidana Islam. Akan tetapi perubahan yang diinginkan di dalam Pasal 483 RUU KUHP setidaknya sudah mulai ada peningkatan, sehingga masyarakat akan lebih berhati-hati dalam bertindak agar tidak terjerumus dan terkena pasal pidana perzinahan.

Proses penyesuaian hukum Islam antara lain adalah nilai-nilai *maqasid al-syari'ah*nya ke dalam hukum pidana nasional, seperti yang terlihat pada pasal 483 RUU KUHP yang juga menganggap orang yang masih lajang juga dapat terkena pasal tentang pidana zina. Pasal tersebut merupakan suatu pemikiran yang cukup bijak jika diterapkan di Indonesia. Jika secara keseluruhan hukum pidana Islam belum bisa dilakukan, minimal prinsip-prinsip utamanya dapat terwujud dalam hukum pidana Indonesia.<sup>35</sup>

Walaupun hukum Pidana di Indonesia belum bisa mengadopsi hukum pidana Islam secara keseluruhan, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh malah sudah menetapkan secara tegas bahwa daerah tersebut berlaku *syari'at* Islam. Hal ini berdasarkan dengan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh bersama Pemerintah Daerah Istimewa Aceh yang telah membuat Qanun Hukum Jinayat Aceh dan telah disahkan pada tanggal 14 September 2009.<sup>36</sup>

Qonun Hkum Jinayat Aceh, dalam konsideran mengingat menjadikan Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber pertama dan

---

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> Neng Djubaedah, *Perzinahan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia ditinjau dari hukum Islam...*, hlm. 209

kedua baru disusul Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Maka sesuai dengan ketentuan khusus bagi wilayah aceh, diundangkanlah ketentuan yang sesuai dengan hukum Islam, seperti yang tampak dalam ketentuan-ketentuan dibawah ini:<sup>37</sup>

Pasal 24 menentukan tentang larangan zina dan hukum bagi pelaku zina muhsan atau muhsanah dan pelaku ghoiru muhsan atau ghoiru mhsanah, bahwa:

- a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan zina, diancam dengan uqubat hudud 100 (seratu) kali cambuk bagi yang belum menikah dan uqubat rajam/ hukuman mati bagi yang sudah menikah.
- b. Setiap orang yang dijatuhi uqubat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikenakan uqubat ta'zir penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.<sup>38</sup>

Dengan penjelasan mengenai RUU KUHP Pasal 483 dan Qanun Hukum Jinayat Aceh tentang zina, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mulai sadar akan perlunya menggali dan memanfaatkan norma-norma hukum yang bersumber pada nilai-nilai budaya dan moral keagamaan, di lain pihak berarti

---

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat Tahun 2009 Diakses di <https://ms-aceh.go.id/data/Peraturan/qanun/rancangan%20qanun-jinayat.pdf> Pada 20 April 2019 Pukul 20.31 WIB



menunjukkan kecenderungan adanya ketidak kepuasan, keprihatinan, dan krisis kepercayaan masyarakat pada sistem hukum dan kebijakan hukum yang selama ini ada.<sup>39</sup>

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofik, dan sosio kultural masyarakat Indonesia dengan melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.<sup>40</sup> Menurut Mohammad Ali Daud, pembangunan hukum nasional di Negara yang mayoritas beragama Islam, unsur agama harus benar-benar diperhatikan.<sup>41</sup>

Pembaharuan tersebut diperlukan terhadap ketidak efektifannya hukum pidana positif di Indonesia, oleh karena itu hukum pidana Islam dapat dijadikan alternatif sumber hukum dalam merealisasikan pembaharuan tersebut. Hukum Islam memiliki kriteria hukum yang sempurna serta lebih dekat dengan budaya masyarakat Indonesia apabila dibandingkan dengan hukum Barat, Karena di dalam hukum pidana Islam memiliki sekurang-kurangnya tiga kriteria yang menjadi bahan

---

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. . . , hlm. 322

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm.30-32

<sup>41</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 267

pertimbangan yang efektif dalam memperbarui materi hukum positif, khususnya di Indonesia:

- a. Memberi kepastian hukum,
- b. Menjunjung tinggi nilai kesusilaan dan agama,
- c. Memiliki kepedulian hukum dengan tidak mengenal delik aduan absolut.<sup>42</sup>

Dengan memberikan kepastian hukum dan menghapuskan pemakaian kata “paling lama”, “setinggi-tingginya”, “sebanyak-banyaknya”, dan kalimat lain semakna dengan itu, akan memberikan pengaruh besar terhadap efektifitas aturan pidana, Terutama terhadap toleransi hukuman terhadap pelaku kejahatan. Dengan tidak adanya toleransi hukuman tersebut akan menimbulkan efek takut kepada masyarakat sehingga mereka tidak akan melakukan kejahatan.<sup>43</sup>

Dengan penjelasan-penjelasan di atas dapat dipahami bahwa prospek delik pidana perzinaan di Indonesia sudah mulai mendapat sorotan karena perundang-undangan hukum pidana yang digunakan dianggap tidak sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia. Oleh karena itu pandangan tentang perubahan agar delik pidana zina dapat menjadi lebih baik lagi

---

<sup>42</sup> Muh Tahmid Nur, “Maslahat Dalam Hukum Pidana Islam” Jurnal, Palopo, Perpustakaan STAIN Palopo Sulawesi Selatan, 2013, hlm. 302 diakses di [http://journal.uin-alaudidin.ac.id/index.php/diskursus\\_islam/article/viewFile/6633/5393](http://journal.uin-alaudidin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/viewFile/6633/5393) Pada 03 Juli 2019 pukul 13.03

<sup>43</sup> Muh Tahmid Nur, “Maslahat Dalam Hukum Pidana Islam”..., hlm. 303

sudah di usulkan didalam RUU KUHP Pasal 483 dan jurnanal-jurnal dan karya tulis lainnya. Tinggal bagaimana pemerintah yang bertanggung jawab terhadap perubahan undang-undang menyikapi usulan-usulan tersebut.

## **BAB IV**

### **TINJAUN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUBUNGAN SEKSUAL DI LUAR PERNIKAHAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

#### **A. Efektifitas Antara Hukum Pidana Islam Dengan KUHP**

##### **Dalam Permasalahan Zina**

Dalam hukum positif Indonesia larangan melakukan zina diatur di dalam Pasal 284 KUHP yaitu seperti yang dijelaskan di dalam bab II yaitu sebagai berikut:

1. Zina menurut pasal 284 KUHP adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Agar masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota (kemaluan) laki-laki harus masuk kedalam anggota (vagina) perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

2. Pasal 284 KUHP membedakan antara mereka yang tidak tunduk pada pasal 27 BW, ialah orang Eropa yang disamakan dengan mereka, dan mereka yang tunduk pada pasal 27 BW (orang yang beragama Islam dsb). Pasal 27 BW mengatakan, bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikah bersama dengan seorang perempuan dan seorang perempuan hanya boleh menikah dengan seorang laki-laki sebagai suaminya. Mereka yang tunduk pada pasal ini, baik laki-laki maupun perempuannya tidak boleh bersetubuh dengan orang lain. Selain dengan istri atau suaminya sendiri.
3. Pasal ini adalah suatu delik aduan yang absolut, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan (dimalukan). Pengaduan ini tidak boleh dibelah maksudnya pengaduan pihak yang dirugikan itu berlaku bagi kedua pihak yang merugikannya yaitu pasangan zinanya.<sup>1</sup>
4. Pelaku zina yang dijelaskan di dalam Pasal 284 KUHP ini hanya dapat di ancam dengan hukuman penjara paling lama 9 bulan.

---

<sup>1</sup> Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana DI Indonesia*, Semarang: Walisongo Pers, 2008, hlm. 7-8

Sedangkan dalam hukum Islam, zina merupakan tindak pidana yang dapat diancam dengan hukuman *had*, yakni hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah. Oleh karena itu hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.<sup>2</sup> Adapun perzinaan dalam hukum pidana Islam di bagi menjadidua macam:

1. Zina *Ghairu Muhsan* yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum menikah, hukuman dari zina ini adalah dicambuk 100 kali dan di asingkan selama satu tahun.
2. Zina *Muhsan* yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah, hukuman untuk zina ini adalah di cambuk 100 kali dan di rajam hingga meninggal dunia.<sup>3</sup>

Adapun penggambaran dari perbedaan perzinaan menurut Pasal 284 KUHP dengan hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

KUHP	Hukum Pidana Islam
<ul style="list-style-type: none"> <li>Yang dapat dianggap sebagai pelaku zina adalah orang yang telah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>laki-laki atau perempuan yang belum menikah maupun yang</li> </ul>

<sup>2</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. xiv

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 3-4

<p>menikah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merupakan delik aduan absolut jadi harus ada pihak yang mengadu bahwa ada pelanggaran zina yang dilakukan</li> <li>• hanya suami/istri yang dirugikan yang dapat mengadukan telah terjadinya perzinaan</li> <li>• hukuman paling lama 9 bulan penjara</li> </ul>	<p>telah menikah dapat dianggap sebagai pelaku zina</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• merupakan delik biasa karena melanggar hak Allah, masyarakat keluarga dari pelaku zina</li> <li>• tidak perlu menunggu ada pihak yang mengadu tetapi langsung dapat diproses</li> <li>• hukuman pezina <i>ghairu muhsan</i> di cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun, hukuman pezina <i>muhsan</i> di cambuk 100 kali dan dirajam</li> </ul>
--	--

Melihat penjelasan-penjelasan diatas memang sangat berbeda sekali antara hukumpidana Islam dengan Hukum pidana di Indonesia. Hal tersebut sangat wajar karena dalam rujukan dasar yang digunakan memang berbeda. Dalam hukum pidana di Indonesia yang digunakan adalah kitab undang-undang hukum pidana masih mengadopsi dari hukum eropa, sedangkan hukum Islam dari Al-Qur'an dan Hadits. Yang akan menjadi pertanyaan adalah lebih efektif manakah antara hukum Islam dengan KUHP dalam menangani permasalahan zina yang ada di Indonesia.

Jika melihat dari sudut pandang hukum yang diberikan, maka akan lebih efektif hukuman yang telah di sampaikan dalam hukum Islam. Karena dalam penjelasannya adalah pelaku zina *muhsan* (yang telah menikah) hukumannya adalah di cambuk 100 kali dan di rajam sedangkan pelaku zina *ghairu muhsan* (yang belum menikah) hukumannya di cambuk seratus kali dan diasingkan. Dari uraian tersebut dijelaskan secara tegas dan pasti apa dan berapa banyak hukuman yang akan diterima oleh pelaku zina.

Sedangkan dalam kitab undang-undang hukum pidana di Indonesia hukuman yang diberikan kepada pelaku zina yang sesuai dengan Pasal 284 adalah di penjara paling lama 9 bulan. Dari penjelasan tersebut KUHP sangat tidak tegas dalam menetapkan hukuman terhadap pelaku zina, di Pasal tersebut di jelaskan bahwa paling lama 9 bulan maka ada kemungkinan hukuman yang akan diterima oleh pelaku zina bisa kurang dari 9 bulan bahkan akan ada toleransi lebih jika delik aduannya dicabut.<sup>4</sup>

Selain itu dalam hukum pidana islam hukuman had harus dilaksanakan secara terbuka, yaitu sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nuur ayat 2:

---

<sup>4</sup> Muh Tahmid Nur, *Maslahat Dalam Hukum Pidna Islam*. . . , hlm.



... وَلَيَشْهَدَنَّ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٠﴾

Artinya: hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.<sup>5</sup>

Dengan dilaksanakannya hukuman secara terbuka di muka umum, maka akan banyak masyarakat yang melihat pelaksanaan hukuman tersebut, sehingga hal tersebut bisa membuat masyarakat merasa takut atau malu jika melakukan kejahatan. Oleh karena itu hukuman yang sesuai dengan hukum islam juga sangat efektif dalam mencegah masyarakat agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan.

Selain itu, Freda Adler (seorang profesor dari Amerika) menemukan bukti-bukti empiris bahwa pelaksanaan hukum pidana Islam di negara Arab Saudi mampu menekan angka kejahatan samapai pada titik yang sangat rendah. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Sam Souryal guru besar sistem peradilan pidana dari Sam Houston State University Amerika Serikat, mencatat bahwa selamasepuluh tahun rata-rata angka kejahatan di Arab Saudi paling kecil

---

<sup>5</sup> Alqur'an annur ayat 2

dibanding negara-negara muslim lainnya yang tidak menerapkan hukum pidana Islam.<sup>6</sup>

Di masa sekarang yang mana kejahatan telah menjadi momok yang menakutkan, hukum pidana Islam dapat menjadi pencegahnya. Dalam catatan beberapa bulan setelah berdirinya kerajaan Arab Saudi yang menegakkan syari'at Islam, perampokan yang biasanya memenuhi jalan-jalan di tengah padang pasir dapat dibersihkan total. Dalam kurun waktu 25 tahun, hanya tercatat 16 kali pelaksanaan hukuman potong tangan. Orang-orang juga dapat melihat bahwa masyarakat setempat hanya menutupi barang-barang dagangannya dengan kain karena tidak khawatir akan adanya pencurian jika di tinggal untuk melaksanakan shalat.<sup>7</sup>

Hukum pidana Islam juga memenuhi syarat sebuah hukum pidana modern. Karena hukum ini juga mengenal asas-asas atau prinsip-prinsip penting hukum pidana, baik yang sudah dikenal oleh hukum barat maupun yang belum, seperti asas legalitas, asas tidak berlaku surut, asas tiada pidana jika ada keraguan, asas kesamaan dihadapan hukum,

---

<sup>6</sup> Topo Santoso, *membumikan hukum pidana islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm 88

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 89

asas praduga tak bersalah, asas perlindungan HAM, asas keadilan, asas kebenaran materil, asas kemanfaatan, dan sebagainya.<sup>8</sup>

## B. Eksistensi Hukum Pidana Islam di Indoneisa

*Jarimah* zina, seperti yang telah dijelaskan di dalam bab II adalah termasuk kedalam *jarimah hudud*, yang mana hukuman dari *jarimah* tersebut telah ditetapkan oleh *syara'* baik bentuk maupun jumlahnya. Oleh karena itu hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya. Adapun macam-macam dari hukuman *jarimah* zina yaitu ada 2:

1. Zina *ghairu muhsan*, yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum menikah. Hukuman dari zina ini adalah didera seratus kali dan di asingkan selama satu tahun.
2. Zina *muhsan*, yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/istri). Hukuman dari zina ini adalah di dera seratus kali dan di *rajam*.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *ibid*

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pisana Islam*. . . , hlm. 29-33

Penjelasan tentang hukuman tersebut yaitu sesuai dengan Hadits Ubadah Ibn Ash-Shamit yaitu:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ (رواه الجماعة الا البخارى والنسائى).

Artinya: Dari Ubadah Ibn Ash-shamit ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya allah telah memberikan jalan keluar (hukuman) bagi mereka (pezina). Jejak dan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam.” (diriwayatkan oleh jama’ah kecuali Bukhari dan Nasa’i).<sup>10</sup>

Umat manusia harus mentaati segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, yaitu sesuai dengan firman Allah di dalam penggalan ayat 48 Surah Al-Maidah:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ

Artinya: dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan

<sup>10</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Syahih Muslim...*, hlm. 361

apa yang sebelumnya yaitu kitab-kitab (yang di turunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab dilain itu maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.<sup>11</sup>

Ayat tersebut diatas menjelaskan kepada kita tentang adanya kewajiban untuk menerapkan dan melaksanakan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an. Kewajiban tersebut ditugaskan kepada Rasulullah dalam fungsi rangkapnya sebagai *Ulil Amri*. Setiap umat Islam diwajibkan untuk menjalankan pola kehidupan yang Islami, yaitu kehidupan yang sinkron dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadits.<sup>12</sup>

Melihat dari penjelasan di atas, umat islam Indonesia harus benar-benar memperhatikan apa yang telah diperbuat di dunia. Jika ia telah terbukti melakukan *jarimah* zina maka hukuman *had* seharusnya tetap harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an dan hadits.

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 116

<sup>12</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 3

Akan tetapi di negara Indonesia tidak bisa untuk melaksanakan hukuman *had* seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadits, karena Indonesia memiliki undang-undang sendiri terkait dengan perzinaan. Yaitu terdapat di dalam pasal 284 KUHP sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

Ke-1 a. seorang pria telah nikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.

b. seorang wanita telah nikah yang melakukan zina.

Ke-2 a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah.

b. seorang wanita yang telah nikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah nikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya.

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.

(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.

- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.<sup>13</sup>

Dari ketentuan Pasal 284 KUHP tentang perzinaan tersebut di atas dapat ditarik penjelasan sebagai berikut:

1. KUHP merumuskan bahwa hubungan seksual di luar pernikahan merupakan suatu kejahatan (delik perzinaan), apabila para pelaku atau salah satu pelakunya adalah orang yang telah terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Hubungan seksual di luar perkawinan yang dilakukan oleh orang yang sama-sama lajang, sama sekali bukan merupakan tindak pidana perzinaan.

---

<sup>13</sup> IKAPI, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Fokus Media, 2012, hlm. 340-341

2. KUHP menetapkan bahwa delik perzinaan termasuk ke dalam salah satu delik aduan absolut. Artinya meskipun telah terjadi perzinaan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 284 KUHP, pelakunya tidak dapat dituntut pidana apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan.<sup>14</sup>

Dengan peraturan tersebut di atas, sangat tidak mungkin untuk tiba-tiba melaksanakan hukuman *had*. Oleh karena itu orang yang melakukan perzinaan dan belum pernah mendapat sanksi pidana zina di dunia, maka urusan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Allah, hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut.

وَالْحَدُّ هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمُقَدَّرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Semarang: Walisongo Pers, 2008, hlm. 7-8

<sup>15</sup> Abdul AL-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamiy*, Jus I, Dar Al-Kitab Al-Arabi, Beirut, tanpa tahun, hlm. 609



Pendapat Abdul Qadir Audah tersebut sesuai dengan

hadits Yahya bin Yahya At-Tamimi sebagai berikut:<sup>16</sup>

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُ  
وَالنَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ  
وَاللَّفْظُ لِعَمْرِ وَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ  
عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ تَبَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا  
تَزْنُوا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ فَمَنْ  
وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ  
فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ  
إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ

Artinya: Yahya bin Yahya At-Tamimi, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Amr An-Naqid dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ibnu Uyainah, lafazh hadits milik ‘Amr, ia berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abu Idris, dari Ubadah bin Ash-Shamit, ia Berkata, kami bersama-sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam suatu majlis. Lalu beliau bersabda, kalian harus berbaiat kepadaku, janganlah menyekutukan Allah dengan segala sesuatu, janganlah berzina, janganlah mencuri, janganlah membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Barang siapa diantara kalian memenuhinya maka pahalanya ditanggung oleh Allah, dan Barangsiapa yang

<sup>16</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim...*, hlm. 438

meakukan salah satunya, lalu ia dihukum had, maka hukuman itu menjadi penebus dosanya, dan barang siapa yang melakukan salah satunya, lalu Allah menutupinya (tidak dihukum), maka urusan diserahkan sepenuhnya kepada Allah; jika Allah berkenan mengampuninya maka Allah akan mengampuninya dan jika Allah berkehendak menyiksanya maka pasti Allah akan menyiksanya.<sup>17</sup>

Selain hadits di atas ada juga hadits yang menjelaskan bahwa ampunan Allah dapat terbuka jika pelaku dosa-dosa besar termasuk zina melaksanakan pertaubatan. yaitu sesuai dengan hadits tentang Ma'iz dan Wanita Ghamidiyah, sebagai berikut:

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى وَهُوَ ابْنُ الْحَرِثِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ غِيْلَانَ وَهُوَ ابْنُ جَامِعِ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ مَا عَزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي فَقَالَ وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ قَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ قَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ الرَّابِعَةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَطَهَّرَكَ فَقَالَ مِنَ الزَّنى فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي جُنُودٍ فَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ فَقَالَ أَشْرَبَ خَمْرًا فَقَامَ رَجُلٌ

---

<sup>17</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim...*, hlm. 422

فَاسْتَنْكَهَ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمَرٍ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَنْيْتَ فَقَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرَقَتَيْنِ قَائِلٌ يَقُولُ لَقَدْ هَلَكَ لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيبَتُهُ وَقَائِلٌ يَقُولُ مَاتُوبَةً أَفْضَلَ مِنْ تَوْبَةِ مَا عَزَّ أَنْتَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ قَالَ فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَتٍ ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ جُلُوسٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَقَالُوا غَفَرَ اللَّهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ تَابَ تَوْبَتٌ لَوْ فُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ قَالَ ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الْأَرْدِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهَّرْنِي فَقَالَ وَيْحَكَ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ فَقَالَتْ أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَدْتَ مَا عِزَّ بْنَ مَالِكٍ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَتْ إِنَّهَا حُبْلَى مِنْ الرِّزْيِ فَقَالَ أَنْتِ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ لَهَا حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكَ قَالَ فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ قَالَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ وَضَعْتَ الْعَمِدِيَّةُ فَقَالَ إِذَا لَا نَرُجْمُهَا وَنَدْعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِلَيَّ رِضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ فَرَجَمَهَا

Artinya: Dan Muhammad bin Al-Ala' Al-Hamadani telah memberi tahukan kepada kami, Yahya Bin Ya'la' ibnu Al-Harits Al-Muharibin telah memberitahukan kepada kami, dari Ghailan bin Jami' Al-Muharribi, dari Al-Qamah bin Martsad, dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya (Buraidah), ia berkaa, Ma'iz bin Malik datang menghadap kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sucikanlah diriku. Beliau bersabda, “ celaka kamu, pulanglah, lalu beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya”.

Perawi berkata, “lalu ia beranjak pergi tak jauh dan kembali lagi dengan berkaa, wahai Rasulullah. Sucikanlah diriku”. Beliau bersabda, “celaka kamu, pulanglah, lalu beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya”. Perawi berkata, “lalu ia beranjak pergi tidak jauh dan kembali lagi dengan berkata, ‘wahai Rasulullah, sucikanlah diriku’. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti tadi, sehingga permintaan itu berulang empat kali, maka Rasulullah Shallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada-Nya, “dengan alasan apa aku mensucikan dirimu?”. Ia menjawab, ‘Sebab: dosa perzinaan’. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, “Apakah ia gila?. “lalu Beliau diberi tahu bahwa ia tidak gila. Beliau pun bertanya lagi, “Apakah ia telah meminum khamer?”. Kemudian seorang laki-laki berdiri dan mendekatkan hidungnya ke mulut Ma’iz dan ia tidak menemukan bau minuman keras. Perawi berkata, “Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, “Apakah engkau telah berzina?. “ Ia menjawab, iya. Kemudian beliau memerintahkan untuk merajamnya. Menanggapi kasus ini para sahabat terbagi menjadi dua kelompok: sebagian berkata, “Ma’iz telah celaka karna kesalahannya yang tak terkirakan”. Sedangkan sebagian lagi berkata, “tidak ada pertaubatan yang lebih utama daripada pertaubatan Ma’iz”, ia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu meletakkan tangannya ditangan beliau, kemudian berkata, “bunuhlah aku dengan

lemparan batu”. Perawi berkata, “ keadaan ini berlangsung duaatau tiga hari, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang, sementara mereka dalam posisi duduk, lalu beliau duduk dan bersabda, “beristighfarlah untuk Ma’iz”. Perawi berkata, “mereka berkata, ‘semoga Allah mengampuni Ma’iz bin Malik’. Perawi berkata, “ Ma’iz telah bertaubat dengan suatu pertaubatan yang jika dibagi unuk umat, niscaya akan sebagian semua. Perawi berkata, kemudian datang seorang wanita ghamidiyah dari kabilah Azd dan berkata, “wahai Rasulullah, sucikanlah aku”, Beliau bersabda, “pulanglah beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya”. Ia berkata, ‘Aku melihatmu berusaha membuatku ragu sebagaimana engkau lakukan kepada Ma’iz bin Malik. ‘Beliau bersabda, “apa maksudmu?”, Ia berkata, ‘Aku sedang hamil karena berzina’, beliau bersabda, “kamu?”. Ia berkata, ‘iya’. Lalu Beliau bersabda kepadanya, “sampai engkau melahirkan bayi yang ada dalam perutmu”. Perawi berkata, “seorang laki-laki dari kaum anshor menanggung wanita itu sampai ia benar-benar melahirkan”. Perawi berkata, ‘Wanita Ghanimiyah itu telah melahirkan’. Perawi berkata, “lalu laki-laki itu menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ‘Wania Ghanimiyah itu telah melahirkan’. Beliau berkata, “dengan demikian, kita tidak boleh merajamnya karena dapat membiarkan anaknya yang masih kecil itu tanpa orang yang menyusuinya”, aku yang menanggung

penyusuannya, wahai Nabiyullah.’ Perawi berkata, “maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh merajam wanita itu”.<sup>18</sup>

Hadits tersebut di atas merupakan dalil bahwa hukuman *had* dapat menghapus dosa kemaksiatan yang menyebabkan hukuman tersebut. Hal ini dengan jelas dinyatakan dalam hadits Ubadah Ibnu Ash-Shamit Radhiyallahu An-hu; yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, “barang siapa yang melanggar (ketentuan bai’at) ini, lalu ia dihukum *had* di dunia maka hukuman itu dapat melebur dosa pelanggaran tersebut”. Dalam hal ini para ulama’ saling menyepakati pendapat tersebut. Hadits tersebut diatas juga menjadi dalil gugurnya dosa-dosa besar dengan cara bertaubat, pendapat ini merupakan kesepakatan kaum muslimin, kecuali satu riwayat dari Ibnu Abbas tentang taubatnya pembunuh, *Wallahu A’lam*.<sup>19</sup>

Hadits di atas juga menjelaskan kenapa Ma’iz dan Wanita Ghamidiyah itu idak menempuh jalur taubat saja, padahal dengan taubat mereka dapat menghapus dosa yang ia lakukan. Akan tetapi mereka keras kepala dan

---

<sup>18</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim...*, hlm. 379-382

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 394

memilih untuk dirajam. Hal itu dikarenakan bahwa kesucian diri dan terhapusnya dosa dengan jalan menerima hukuman had itu lebih meyakinkan. Apalagi yang memerintahkan hukuman tersebut adalah Rasulullah saw. Sementara taubat seseorang belum pasti diterima dan ditakutkan kurang memenuhi syarat taubatan *nashuh*, sehingga dosa kemaksiatan tetap ada pada dirinya.<sup>20</sup>

Taubat sendiri adalah meninggalkan maksiat dalam segala hal, menyesali dosa yang pernah diperbuat dan tidak mengulangnya kembali.<sup>21</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia taubat diartikan dengan sadar dan menyesal akan dosanya dan berniat untuk memperbaiki perilaku yang dilakukannya. Diartikan juga kembali kepada agama dan jalan yang benar.<sup>22</sup>

Adapun yang dapat dikatakan telah melakukan tobat *nashuh* menurut Al-Qurtubi adalah yang telah memenuhi empat syarat sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 394-395

<sup>21</sup> Burhan Jamaludin, *Konsepsi Taubat, Pintu Pengampunan Dosa Besar Dan Syirik*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1996, hlm 3

<sup>22</sup> Tim Penyusun Kamus, *Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen P&K, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998, hlm. 954

1. istighfar dengan lisan,
2. meninggalkan dosa dengan anggota badan,
3. memantapkan niat untuk tidak mengulanginya lagi,  
dan
4. meninggalkan semua teman buruk.<sup>23</sup>

Dengan penjelasan diatas, tobat bukan suatu perkara yang hanya diucapkan lewat lisan saja, akan tetapi hendaklah bersungguh-sungguh dan *istiqamah* dalam pertaubatannya itu, karena melihat realita yang terjadi begitu banyak orang yang telah mengaku sudah bertaubat dan sangat mudah mengucapkan kata taubat tanpa mengaplikasikan aturan dan syarat-syaratnya, hingga tidak jarang taubat hanya dijadikan sebagai ritualistik yang mengesampingkan esensi dari makna yang sebenarnya.

Jika memang pertaubatan yang dilakukan oleh orang Indonesia yang telah berzina tidak sesuai dengan ketentuan pertaubatan nashuh dan belum pernah mendapatkan *had* zina, walaupun ia telah melaksanakan perkawinan wanita hamil, maka kejahatan zina yang pernah dilakukan pasti akan mendapatkan ganjarannya

---

<sup>23</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 14*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 178



(balasannya). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Zalzalah ayat 7-8 yaitu sebagai berikut:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan) nya (7). Dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan) nya pula (8).<sup>24</sup>

Ayat di atas menunjukkan bukti bahwa betapa Allah maha adil, yaitu dengan memberikan balasan pahala bagi hamba-Nya yang mengerjakan kebaikan dan memberikan balasan hukuman bagi hamba-Nya yang melakukan kejahatan.<sup>25</sup> Dengan demikian jika manusia melakukan sedikit kebaikan saja akan mendapatkan balasan, bagaimana jika melakukan banyak kebaikan?, begitu pula dengan sedikit kejahatan saja akan mendapatkan balasan, bagaimana jika melakukan banyak kejahatan? Tentu Allah akan membalasnya dengan adil

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 599

<sup>25</sup> Dewi Fatahillah, "Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Atas Ayat-Ayay Syadidul Iqab dan Syadidul Azab Dalam Tafsir Al-Misbah" Skripsi UIN Sunan kalijaga Jogjakarta, 2017, hlm. 2, di Akses di [http://digilib.uin-suka.ac.id/25254/1/11530008\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/25254/1/11530008_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf) Pada 23 Mei 2019 Pukul 05.29

dan setimpal, sebanyak kebaikan atau kejahatan yang dilakukan oleh hambanya, *wallahu a'lam*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Peraturan-peraturan pidana di Indonesia sebagaimana yang diatur di dalam KUHP yang diadopsi dari hukum pidana Belanda, belum efektif dalam menanggulangi permasalahan perzinahan. Hal ini dikarenakan zina hanya dianggap sebagai bagian dari persoalan yang sangat privat (pribadi). oleh karena itu, hanya orang yang telah menikah saja yang dapat di anggap sebagai pezina, sedangkan untuk yang belum menikah tidak bisa dianggap sebagai pezina.

Karena kehidupan masyarakat yang terus berkembang, maka memunculkan ragam tuntutan untuk melakukan berbagai perubahan ke arah yang lebih baik, perubahan tersebut tentu saja tidak boleh terpisah dari kerangka sistem hukum nasional yang dibangun berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, oleh karena itu muncullah Rancangan Undang-Undang yang membahas tentang perubahan undang-undang di Indonesia sebagai

usaha dalam merubah Undang-Undang ke arah yang lebih baik. Salah satu perubahan yang di inginkan dan telah disampaikan adalah Pasal tentang perzinahan yaitu terdapat di dalam Pasal 483 RUU KUHP Tahun 2013. Walaupun dalam RUU KUHP tersebut belum secara keseluruhan mencakup hukum pidana islam, minimal prinsip –prinsip utamanya dapat terwujud di dalam hukum pidana Indonesia.

2. Allah telah menyerukan di dalam Surah Al-Maidah ayat 48 bahwa manusia memiliki kewajibannya untuk menerapkan dan melaksanakan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits. Oleh karena itu *jarimah zina* yang telah dilakukan oleh masyarakat muslim Indonesia seharusnya tetap mendapatkan hukuman sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Akan tetapi di Negara Indonesian telah memiliki KUHP sebagai dasar hukum pidananya, sehingga hukuman *had* sesuai dengan yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, para pelaku masih harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah SWT atas pelanggaran terhadap jarimah zina ini, salah satu solusi atas permasalahan ini adalah memohon

ampun dari Allah dengan menyertakan rasa bersalah dan berjanji akan bertaubat atas kesalahannya sesuai dengan hadits Nabi Muhammad Saw. tentang Ma'iz dan Wanita Ghamidiyah.

## **B. Saran**

Agar dapat mewujudkan suatu Negara yang aman dari permasalahan perzinaan dan menjadi Negara yang lebih baik di masa yang akan datang, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Pemerintah Indonesia harus melakukan perubahan di dalam hukum pidana, terutama pasal tentang perzinaan yang saat ini masih banyak kelemahan-kelemahannya dengan merubah sesuai kebutuhan hukum di Indonesia, dan memasukkan nilai-nilai hukum pidana Islam. karena pada saat ini peraturan tentang perzinaan tidak sesuai dengan kultur Masyarakat Indonesia yang religius dan mayoritas beragama Islam.
2. Seluruh Masyarakat Indonesia harus bersama-sama mengawal dan mendukung perubahan hukum pidana di Indonesia ke arah yang lebih baik, terutama terhadap perubaha pasal-pasal tentang perzinaan di dalam KUHP yang saat ini sangat tidak efektif dalam menanggulangi permasalahan zina di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Baharudin dan Illi Yanti, *Eksistensi Dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012
- Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007
- Al-Ghazali, Imam, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Surabaya, Putra Pelajar, 2002
- Al-Islamiy, Abdul AL-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy*, Jus I, Dar Al-Kitab Al-Arabi, Beirut, tanpa tahun
- Al-Kahlani, Muhammad ibn Isma'il, *Subul As-Salam*, juz IV, Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, Mesir cetakan IV, 1960
- An-nawawi, Imam, *Syarah Syahih Muslim*, Jakarta Timur, Darus Sunnah, 2013
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung*, Citra Aditya, 1996
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010
- As-Sajastani, Abu Dawud Sulaiman ibn Al-asy'ats, *Sunan Abu Dawud*, Juz IV, Dar Al-Fikr, tanpa tahun
- Asy-Syaukani, Muhammad Ibn Ali, *Nailul Al-Authar*, juz VII, Dar Al-Fikr, tanpa tahun

- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Bandung, Syaamil Quran, 2009
- Djubaeda, Neng, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta, Kencana Media, 2010
- Doi, Abdur Rahman, *Inilah Syariat Islam*, Jakarta, Pustaka Panji Mas, 1990
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta, Logung Pustaka, 2004
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- IKAPI, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung, Fokus Media, 2012
- Irfan, Nur, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Amzah, 2016
- Jamaludin, Burhan, *Konsepsi Taubat, Pintu Pengampunan Dosa Besar Dan Syirik*, Surabaya, Dunia Ilmu, 1996
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Muliadi, Ahmad, *Politik Hukum*, Padang, Akademia Permata, 2013
- Muslich, Ahmad Wardi, *hukum pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- ....., *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006

- Nawawi, Hasan, *Instrumen Peneliian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada Universitas, Cet II, 1995
- Rokhmadi, *Hukum pidana Islam*, Semarang, CV Karya Abadi Jaya, 2015
- Rosyadi, Otong, dan Andi Daswan, *Study Politik Hukum*, Yogyakarta, Thafa Media, 2013
- Santoso, Topo, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016
- ....., *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Gema Insani, 2003
- Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid 2, Beirut : Libanon, Dar Al-Fikr, 1992
- Shihab, M Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 14*, Jakarta, Lentera Hati, 2002
- straus , Anselm dan Juliet corbin, *dasar-dasar penelitian kualitatif*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1997
- Suadi, Amran dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Jakarta, PT Kharisma Putra Utama, 2016
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, 1983
- Sulaeman, Eman *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Semarang, Walisongo Pers, 2008



Tim Penyusun Kamus, *Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen P&K, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1998

#### INTERNET

Ajim, Zul Anwar, "Formulasi Tindak Pidana Zina Dalam RUU KUHP Indonesia Dan Sumbangan Hukum Islam Terhadapnya" jurnal reformasi tindak pidana zina, IAIN Padang Sidempuan, 2015 diakses di <http://jurnal.iainpadangsidempuan.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/download/601/525>

Agustiawan, " Analisis tindak pidana perzinaan (study komparatif antara hukum Islam dan hukum nasional)", Skripsi UIN Alaudin Makasar, 2016, di akses di <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1297/>

Amelia, Fitri, "Tinjauan hukum Islam tentang perkawinan wanita hamil", Universitas Airlangga Surabaya, 2016, diakses di <http://repository.unair.ac.id/14210/>

Fatahillah, Dewi, "Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Atas Ayat-Ayay Syadidul Iqab dan Syadidul Azab Dalam Tafsir Al-Misbah" Skripsi UIN Sunan kalijaga Jogjakarta, 2017, hlm. 2, diakses di [http://digilib.uin-suka.ac.id/25254/1/11530008\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/25254/1/11530008_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)

Hamsani, " Analisis hukum pidana Islam terhadap pasal 483 rancangan konsep KUHP tahun 2012 tentang zina". Skripsi

- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018, diakses di [http://digilib.uinsby.ac.id/23393/7/Hamsani\\_C03211014.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/23393/7/Hamsani_C03211014.pdf)
- Ihda, Shofiyatun Nisa, “Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Tentang Delik Perzinaan”, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2017, diakses di [https://www.google.com/search?q=study+komparasi+ hukum+pidana+islam+dengan+hukum+positif+terhadap+zina%27&rlz=1C1GCEA\\_enID846ID846&oq=study+komparasi+ hukum+pidana+islam+dengan+hukum+positif+terhadap+zina%27&aqs=chrome..69i57.21704j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=study+komparasi+ hukum+pidana+islam+dengan+hukum+positif+terhadap+zina%27&rlz=1C1GCEA_enID846ID846&oq=study+komparasi+ hukum+pidana+islam+dengan+hukum+positif+terhadap+zina%27&aqs=chrome..69i57.21704j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8)
- Nur, Muh Tahmid, “Maslahat Dalam Hukum Pidana Islam” Jurnal, Palopo, Perpustakaan STAIN Palopo Sulawesi Selatan, 2013, hlm. 302 diakses di [http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/diskursus\\_islam/article/viewFile/6633/5393](http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/viewFile/6633/5393)
- Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat Tahun 2009 Diakses di <https://ms-aceh.go.id/data/Peraturan/qanun/rancangan%20qanun-jinayat.pdf>
- Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2013, diakses di [https://antikorupsi.org/sites/default/files/doc/RUU%20KUHP\\_2013.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/doc/RUU%20KUHP_2013.pdf)

Walid, Agus Choirul, "Melacak Dasar-Dasar Penerapan Had Rajam  
Bagi Pelaku Zina Muhson" Skripsi, Semarang, UIN  
Walisongo, 2015, diakses di  
<http://eprints.walisongo.ac.id/3657/>

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Moh Fadlli Khoirina

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat Tanggal Lahir: Pati, 29 November 1993

Alamat : Kedungwinong Sukolilo Pati

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Nama Orang Tua

Ayah : Suparlan

Ibu : Siti Asiroh

Riwayat Pendidikan :

1. MI Sultan Agung 01 Sukolilo Pati (2001-2006)
2. MTS Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati (2006-2009)
3. MA Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati (2009-2012)